

# IMPLEMENTASI PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DI KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL

# **SKRIPSI**

Disajikan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Pada Universitas Negeri Semarang

> Oleh Alex Kurniawan NIM 3353405542

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2011

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Tanggal :

Pembimbing I Pembimbing II

<u>Amin Pujiati, SE, MSi</u>
NIP : 196908212006042001

Drs. ST. Sunarto, MS
NIP. 194712061975011001

Mengetahui, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Hj Sucihatiningsih, DWP, MSi NIP. 196812091997022001

# PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Penguji

Lesta Karolina, S.E, M..Si
NIP.198007172008012016

Anggota I

Amin Pujiati, SE, MSi
NIP. 196908212006042001

PERPUSTAKA

Mengetahui,

<u>Drs. S. Martono, M.Si</u> NIP. 196603081989011001

Dekan Fakultas Ekonomi

#### MOTTO DAN PERSEMBAHAN

# **Motto:**

- ⇒ Sabar, Ikhlas, dan Ikhtiar adalah kunci dari Keberhasilan
- ⇒ Cita-cita masa depan itu sesungguhnya dibangun berdasarkan pada perjuangan yang dilakukan hari ini.....(Kahlil Gibran)
- ⇒ Memang punya tekad bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa tekad tidak mungkin ada segalanya. (Andrie Wongso)

# **PERSEMBAHAN:**

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Bapak, Ibu, yang selalu menyayangi, mencintai, dan mendoakanku setulus hati.
  - Ratnasari yang selalu menyayangi, mendukung, dan menemaniku..
  - 3. Sahabatku tersayang, terima kasih dukungan kalian.
  - 4. Almamater yang aku banggakan.

#### **KATA PENGANTAR**

Seraya mengucap syukur Alhamdulilah, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarNya kehadirat Allah S.W.T atas taufik dan hidayah-Nya telah tersusun skripsi ini yang berjudul "IMPLEMENTASI PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) DI KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL".

Maksud dantujuan penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima dan mendapat bantuan serta bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena, itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya

# kepada:

- Drs. Martono, MSi, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
- Dr. Hj Sucihatiningsih, DWP, MSi Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
- Amin Pujiati, SE, MSi, Dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini

- 4. Drs. ST. Sunarto, MS, Dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini
- Bapak dan ibu yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materil.
- 6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Selanjutnya, besar harapan penulis semoga skripsi ini memberi manfaat dan menjadi pengetahuan bagi semua pihak.

  Semarang, Februari 2011

  Penulis

  PERPUSTAKAAN

#### **SARI**

**ALEX KURNIAWAN,** 2011.. "Implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2kp) Di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal". Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.

# Kata Kunci : Implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin. P2KP dimulai pada tahun 1999. Pada awalnya program tersebut dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan sebagai akibat dari krisis ekonomi tahun 1997-1998. P2KP merupakan program jangka panjang dalam menanggulangi kemiskinan dan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah profil keluarga miskin penerima dana bergulir P2KP di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tahun 2007 khususnya di Desa Blorok dan Desa Brangsong, Bagaimanakah implementasi: Penggunaan dana bergulir lingkungan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), pengembalian dana bergulir lingkungan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan bagaimana keberhasilan implementasi P2KP di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tahun 2007 khususnya di Desa Blorok dan Desa Brangsong?

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga yang dikategorikan miskin yang ada di Desa Blorok dan Desa Brangsong, yang berjumlah 390 kepala keluarga yang tersebar dalam 6 RW dan 12 RT untuk Desa Blorok dan yang berjumlah 545 kepala keluarga yang tersebar dalam 8 RW dan 24 RT untuk Desa Brangsong, populasi total dalam penelitian ini sebanyak 936 kepala keluarga miskin., sedangkan Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode area proporsional random sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan wilayah di masing-masing bagian terampil sampelnya secara acak penentuan sampel dihitung dengan rumus, pengambilan sampel sebanyak 90 kepala keluarga sudah dianggap representatif. Variabel dalam penelitian ini adalah implementasi proyek penanggulangan kemiskinan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner, dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif persentase.

Hasil penelitian menunjukkan Kondisi keluarga miskin di Kecamatan Brangsong menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan adalah SD dengan pekerjaan tetap sebagai pedagang. Tingkat pendapatan masyarakat sebagian besar > Rp.600.000,00 setiap bulan dengan jumlah tanggungan keluarga dalam satu rumah berkisar antara 3 – 5 orang. Implementasi P2KP dilihat dari penilaian masyarakat mengenai P2KP, berdasarkan hasil penelitian, rata-rata sebesar 74,34 % masyarakat menilai implementasi P2KP berhasil dengan adanya manfaat langsung (seperti menghemat pengeluaran untuk transportasi, menghindari kecelakaan, bermanfaat untuk kepentingan umum, dan memudahkan

mengangkut hasil-hasil pertanian. Keberhasilan P2KP dalam melaksankan programnya mencapai 51%-75%. Pelaksanaan program P2KP tertinggi adalah pembangunan MCK yang berada pada tingkat 76%-100%. MCK merupakan salah satu fasilitas yang sangat vital bagi sebuah keluarga. Keberadaan MCK yang bersih dan sehat diharapkan akan meningkatkan kesehatan masyarakat di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Saran bagi BKM, hendaknya selalu berusaha untuk memberikan pemahaman yang benar dan tepat kepada keluarga miskin, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dengan penerima bantuan, dan bagi pelaksanaan P2KP selanjutnya perlu diupayakannya pendekatan yang lebih persuasif dan menarik kepada KSM - KSM yang ada, misalnya pertemuan atau sarasehan yang dikondisikan dengan tidak begitu formil namun tetap tepat pada sasaran yang dituju. Bagi keluarga miskin, hendaknya dapat mempergunakan dana yang telah dipinjamkan sesuai dengan yang telah direncanakan, dengan menjalankan usaha produktif sehingga pendapatan dapat meningkat, dan apabila mendapatkan kesulitan segera dimusyawarahkan dengan BKM yang ada. Selain itu masyarakat hendaknya dapat lebih aktif dalam menghadiri dan mengikuti pertemuan maupun pelatihan bagi KSM yang dilakukan oleh BKM sehingga pemahaman dan kemampuan mereka untuk memanfaatkan bantuan yang diperoleh maksimal yang akhirnya bantuan tersebut mampu menjadi pendorong untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan bagi Pemerintah daerah, pelaksanaan P2KP hendaknya lebih ditingkatkan terutama masalah alokasi dana. Pemda Kabupaten Kendal seharusnya dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan proporsi dana P2KP sehingga implementasi P2KP dapat berjalan lebih optimal.



# **DAFTAR ISI**

		Halaman
HALAM	AN JUDUL	i
HALAM	AN PERSETUJUAN	ii
HALAM	AN KELULUSAN	iii
PERNYA	ATAAN	iv
мото р	OAN PERSEMBAHAN	v
KATA PI	ENGANTAR	vi
ASBTRA	.K	viii
DAFTAR	R ISI	ix
DAFTAR	R TABEL	xi
DAFTAR	R GAMBAR	xii
BAB I	PENDAHULUAN	11
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Perumusan Masalah	7
	1.3 Tujuan Penelitian	8
	1.4 Kegunaan Penelitian	8
BAB II	LANDASAN TEORI	10
	2.1 Kemiskinan	10
	2.1.1 Konsep Kemiskinan	10
	2.1.2 Indikator Utama Kemiskinan	16
	2.1.3 Ciri-Ciri Kemiskinan	17
	2.1.4 Dimensi Kemiskinan	18

2.1.5 Jenis Kemiskinan	20
2.1.6 Penyebab Kemiskinan	21
2.1.7 Pola Kemiskinan	24
2.2 Kesejahteraan	25
2.2.1 Pengertian Kesejahteraan	25
2.2.2 Indikator Kesejarhteraan	26
2.3 Strategi dan Kebijakan Dalam Menanggulangi	
Kemiskinan	29
2.3.1 Strategi Menanggulangi Kemiskinan	29
2.3.2 Kebijakan Penaggulangan Kemiskinan	29
2.3.3 Program Kemiskinan	30
2.4 Konsep Program Penanggulangan kemiskinan	33
2.4.1 Tujuan	33
2.4.2 Kelompok Sasaran	33
2.4.3 Strategi Pelaksanaan	34
2.5 Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan	35
2.5.1 Pedoman Petunjuk	35
2.5.2 Kriteria Penerima Dana	37
2.6 Komponen-Komponen Program	38
2.6.1 Alokasi Dana dan Sumber dana P2KP	39
2.6.2 Sumber Pendanaan	40
2.7 Struktur Organisasi Pelaksanaan P2KP	41
2 8 Kerangka Bernikir	44

BAB III	METODE PENELITIAN	47
	3.1 Populasi	47
	3.2 Sampel	47
	3.3 Variabel Penelitian	49
	3.4 Metode Pengumpulan Data	50
	3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas	51
	3.6 Metode Analisis Data	53
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
	4.1 Hasil Penelitian	55
	4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	55
	4.1.2 Responden	56
	4.1.3 Implementasi P2KP	79
	4.1.4 Penggunaan Dana Bergulir	85
	4.1.5 Pengembalian Dana Bergulir	92
	4.1.6 keberhasilan Implementasi P2KP	93
	4.1.7 Kondisi keluarga di Kecamatan Brangsong	96
	4.1.8 Implementasi P2KP	98
	4.1.9 Tingkat Keberhasilan Implementasi P2KP	99
	4.2 Pembahasan	100
	4.2.1 Kondisi Keluarga di Kecamatan Brangsong	100
	4.2.2 Implementasi P2KP	101
	4.2.3 Tingkat Keberhasilan	103

BAB V	PENUTUP	104
	5.1 Simpulan	104
	5.2 Saran	105
DAFTAF	R PUSTAKA	106
LAMPIR	AN – LAMPIRAN	107



# **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Jumlah dan Perentase Penduduk Miskin	3
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kendal	5
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Miskin Kecamatan Brangsong	6
Tabel 2.1	Alokasi Dana BLM Program P2KP	40
Tabel 3.1	Jumlah Rumah Tangga Miskin	48
Tabel 4.1	Kepala Keluarga Dirinci berdasarkan Usia	57
Tabel 4.2	Kepala keluarga dirinci berdasarkan tingkat pendidikan	58
Tabel 4.3	Kepala keluarga dirinci berdasarkan pekerjaan tetap	60
Tabel 4.4	Kepala keluarga dirinci berdasarkan jumlah tanggungan 62	
Tabel 4.5	Kepala keluarga dirinci berdasarkan luas lantai	63
Tabel 4.6	Kepala keluarga dirinci berdasarkan luas lantai	65
Tabel 4.7	Kepala keluarga dirinci berdasarkan jumlah tabungan	65
Tabel 4.8	Kepala keluarga dirinci berdasarkan dinding	66
Tabel 4.9	Kepala keluarga dirinci berdasarkan sumber penerangan	67
Tabel 4.10	Kepala keluarga dirinci berdasarkan sumber air	69
Tabel 4.11	Kepala keluarga dirinci berdasarkan bahan bakar	70
Tabel 4.12	Kepala keluarga dirinci berdasarkan mengkonsumsi Daging	72
Tabel 4.13	Kepala keluarga dirinci berdasarkan Kemampuan	73
Tabel 4.14	Kepala keluarga dirinci berdasarkan tempat	75
Tabel 4.15	Kepala Keluarga Dirinci berdasarkan Jumlah penghasilan .	76
Tabel 4.16	Kepala Keluarga Dirinci berdasarkan Perabotan	78

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Dimensi Kemiskinan	19
Gambar 2.2	Lingkaran Setan Kemiskinan	24
Gambar 2.3	Struktur Organisasi pelaksanaan P2KP	43
Gambar 2.4	Kerangka Pikir	46
Gambar 4.1	Kepala Keluarga Dirinci berdasarkan Usia	57
Gambar 4.2	Kepala keluarga dirinci berdasarkan tingkat pendidikan 58	}
Gambar 4.3	Kepala keluarga dirinci berdasarkan pekerjaan tetap	60
Gambar 4.4	Kepala keluarga dirinci berdasarkan jumlah tanggungan	62
Gambar 4.5	Kepala keluarga dirinci berdasarkan luas lantai	63
Gambar 4.6	Kepala keluarga dirinci berdasarkan luas lantai	65
Gambar 4.7	Kepala keluarga dirinci berdasarkan jumlah tabungan	65
Gambar 4.8	Kepala keluarga dirinci berdasarkan dinding	66
Gambar 4.9	Kepala keluarga dirinci berdasarkan sumber penerangan	67
Gambar 4.10	Kepala keluarga dirinci berdasarkan sumber air	69
Gambar 4.11	Kepala keluarga dirinci berdasarkan bahan bakar	70
Gambar 4.12	Kepala keluarga dirinci berdasarkan mengkonsumsi Dagin	g 72
Gambar 4.13	Kepala keluarga dirinci berdasarkan Kemampuan	73
Gambar 4.14	Kepala keluarga dirinci berdasarkan tempat	75
Gambar 4.15	Kepala Keluarga Dirinci berdasarkan Jumlah penghasilan	76
Gambar 4.16	Kepala Keluarga Dirinci berdasarkan Perabotan	78

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

Selama tiga dekade, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorentasi material, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Di samping itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri.

Turner (1972: 154) merekomendasikan pemerintah membantu golongan miskin untuk menolong dirinya sendiri dengan memberdayakan diri sendiri (*self-empowerment*). Perumahan swadaya seringkali menciptakan perlindungan yang lebih baik daripada perumahan yang dibangun oleh Pemerintah. Hal ini dapat dijalankan dengan kebijakan yang bersifat *partisipatori* dan *emansipatori*, artinya di dalam pengambilan keputusan yang akan dipakai sebagai kebijakan hendaknya subyek pembangunan secara imperatif diikutsertakan dalam kesetaraan.

Program penanggulangan kemiskinan sebenarnya terus dilaksanakan pemerintah mulai dari Inpres Desa Tertinggal (IDT), Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Program Kompensasi Pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPSsebagainya. Namun program/proyek yang telah BBM), dan lain dilaksanakan hanyalah program jangka pendek dan tidak memberikan pelatihan ketrampilan kerja yang berkelanjutan, setelah program selesai, semuanya selesai. Pemerintah seharusnya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan tujuan jangka panjang dan dapat berlangsungnya pembangunan berkelanjutan (Sustainable yang Development) sehingga kemiskinan di Indonesia dapat ditekan.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin. P2KP dimulai pada tahun 1999. Pada awalnya program tersebut dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan sebagai akibat dari krisis ekonomi tahun 1997-1998. P2KP merupakan program jangka panjang dalam menanggulangi kemiskinan dan bertujuan untuk mengurangi angka

# kemiskinan dari tahun ke tahun

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 39,05 juta (17,75 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Februari 2007 yang berjumlah 35,10 juta (15,97 persen), berarti jumlah penduduk miskin

meningkat sebesar 3,95 juta. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2008, sebagian besar (63,41 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan (BPS, 2009).

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia pada periode 1999-2008 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi pada saat krisis moneter dan setelah krisis moneter sehingga berdampak pada bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia. Untuk lebih jelas mengenai jumlah dan presentase penduduk di Indonesia menurut daerah pada tahun 1999-2008 dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah, 1997-2006

115	Jumlah Penduduk Miskin (Juta) Persentase Pendud		łuk Miskin			
Tahun			11 11 6		3	
71	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2000	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
2001	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,23
2002	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2003	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2004	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2005	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2006	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2007	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2008	12,40	22,70	35,10	11,37	19,51	15,97

<sup>\*</sup> Data hingga Maret 2009

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pada periode 2000-2002 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,0 1 juta pada tahun 2000

menjadi 47,97 juta pada tahun 2002. Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama. Pada periode 2002-2005 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 9,57 juta, yaitu dari 47,97 juta pada tahun 2002 menjadi 38,40 juta pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 23,43 persen pada tahun 2002 menjadi 18,20 persen pada tahun 2005. Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada periode 2005-2008 sebesar 3,3 juta, yaitu dari 38,40 juta pada tahun 2005 menjadi 35,10 juta pada tahun 2008. Persentase penduduk miskin turun dari 18,20 persen pada tahun 2005 menjadi 15,97 persen pada tahun 2008. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2009 sebesar 39,05 juta (17,75 persen). Pada maret 2009 Dibandingkan dengan penduduk miskin pada 2008 yang berjumlah 35,10 juta (15,97 %), berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta(17,75 %).

Adapun untuk Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang mempunyai wilayah luas dan populasi penduduk yang banyak, Jumlah penduduk tahun 2006 mencapai 33,18 juta jiwa, dengan penduduk miskin 5,9 juta jiwa tahun 2006. Sedangkan jumlah Kepala Kelurga sebanyak 8.844.220 KK dan sebanyak 2.171.201 Kepala Keluarga termasuk kategori Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tersebar di 35 Kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah (Susenas).

Adapun jumlah penduduk miskin di Kecamatan Brangsong antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tabel Penduduk Miskin di Kabupaten Kendal

Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	
Weleri	543	2,986	
Kaliwungu	322	562	
Brangsong	555	3,562	
Kota Kendal	503	1,033	
Boja	604	4,698	
Cepiring	1,685	7,521	
Patebon	247	3,562	
Sukorejo	398	1,872	
Rowosari	1,260	4,233	
Gemuh	1,015	4,223	
Pegadon	3,98	2,986	

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang mempunyai wilayah luas dan populasi penduduk yang banyak, Jumlah penduduk tahun 2009 mencapai 33,18 juta jiwa, dengan penduduk miskin 5,9 juta jiwa tahun 2009. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 8.844.220 KK dan sebanyak 2.171.201 Kepala Keluarga termasuk kategori Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tersebar di 35 Kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah (Susenas).

UNNES

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kendal Tahun 2008

Desa	Jumlah	Penduduk	Penduduk	Penduduk
	KK	laki-laki	perempuan	miskin
				(KK)
Brangsong	548	1.326	2.864	4.190
Blorok	561	1.130	1.061	1.326

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Dalam rangka memperoleh data tentang keluarga miskin, BPS telah menentukan kriteria penentu keluarga miskin. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Luas lantai kurang dari 8 m² per kapita
- 2. Lantai tempat tinggal berupa tanah/bambu/kayu kualitas rendah/murahan
- 3. Dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu kelas rendah/murah/tembok tanpa plester.
- 4. Tidak punya tempat buang air besar sendiri.
- 5. Sumber air minum berupa sumur/mata air tak terlindungi/sungai/hujan.
- 6. Sumber penerangan utama rumah tangga bukan listrik.
- 7. Bahan bakar untuk masak sehari hari adalah kayu/arang/minyak tanah.
- Tidak pernah mengkonsumsi daging/ayam/susu dalam seminggu atau hanya seminggu sekali.
- 9. Hanya mampu makan 1 atau 2 kali sehari.
- Tidak dapat membeli baju baru dalam setahun atau paling hanya 1 kali setahun.
- 11. Tidak mampu membayar berobat ke Pukesmas/Poliklinik.
- 12. Tani dengan lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh dengan pendapatan dibawah Rp 600.000,- per bulan.
- 13. Tidak pernah sekolah, tidak tamat SD atau hanya tamat SD.
- 14. Tidak punya tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,- (emas, TV, ternak, dan lain lain).

Kriteria – kriteria yang ditetapkan oleh BPS tersebut digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu keluarga itu masuk dalam kategori keluarga miskin

atau tidak. Sehingga program yang digulirkan oleh pemerintah tepatpada sasaran. Pada dasarnya program yang digulirkan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup keluarga miskin. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah mulai dari Inpres Desa Tertinggal yang dimulai Tahun Anggaran 1994/1995 hingga program yang dilakukan selama krisis yaitu berupa Jaring Pengaman Sosial (pertengahan tahun 1998)merupakan upaya yang ditempuh pemerintah sehingga diharapkan jumlah keluarga miskin dapat berkurang.

Pemerintah menyadari bahwa keluarga miskin tidak hanya berlokasi di desa — desa miskin di wilayah terpencil dimana telah tercakup dalam program IDT, tetapi juga di tempat — tempat lain yang kurang terpencil bahkan perkotaan. Sehubungan dengan itu, pemerintah memandang perlu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di perkotaan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam menanggulangipersoalan kemiskinan struktural maupun yang diakibatkan oleh krisis ekonomi. Kegiatan inia tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan daruratyang kini kita alami, namun juga bersifat strategis karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa intitusi masyarakat yang menguat bagi perkembangannya dimasa mendatang. Pada akhirnya upaya penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis memilih judul "Implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal".

#### 1.2 Permasalahan

Berangkat dari uraian dalam latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah profil keluarga miskin penerima dana bergulir P2KP di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tahun 2007 khususnya di Desa Blorok dan Desa Brangsong ?

# 2. Bagaimanakah implementasi:

- a. Penggunaan dana bergulir lingkungan Badan Keswadayaan

  Masyarakat (BKM) Program Penanggulangan Kemiskinan di

  Perkotaan (P2KP) ?
- b. Pengembalian dana bergulir lingkungan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) ?
- 3. Bagaimana keberhasilan implementasi P2KP di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tahun 2007 khususnya di Desa Blorok dan Desa Brangsong?

# UNNES

# 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mendiskripsikan dan mengnalisis tentang :

 Profil keluarga miskin penerima dana bergulir P2KP di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal khususnya di Desa Blorok dan Desa Brangsong

# 2. implementasi:

- Penggunaan dana bergulir lingkungan Badan Keswadayaan
   Masyarakat (BKM) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
- Pengembalian dana bergulir lingkungan Badan Keswadayaan
   Masyarakat (BKM) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
- Keberhasilan implementasi P2KP di Kecatan Brangsong Kabupaten Kendal khususnya di Desa Blorok dan Desa Brangsong.

# 1.4 Kegunaan Penelitian

- 1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana kemiskinan itu dan upaya pengentasan kemiskinan.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pemerhati masalah sosial khususnya tentang kemiskinan.

#### 2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi bagi pembaca dan penulis lain sebagai inspirasi untuk dikembangkan ke topik lain.

#### BAB II

# LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kemiskinan

# 2.1.1 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan seseorang baik yang mencakup material maupun non material. (Reitsma dan Kleipenning dalam Tjiptoherijanto, 1997:70).

Pengertian "Miskin" menurut kamus yang disusun oleh WJS Porwadarmita, berarti "tidak berharta benda, serba kurang". Sementara *The Concise Oxford Dictionary* memberikan devinisi "poor" sebagai "Lacking adequate money or to live comfortably". Dari kedua pengertian tersebut jelas sekali bahwa pengertian kemiskinan tidak semata-mata berhubungan dengan uang saja. Pengertian harta benda lebih luas dari sekedar uang. Demikian juga hainya dengan "means to live comfortably" (Tjiptoheriyanto, 1996:109). Kemiskinan kemudian didefinisikan lebih luas dari sekedar miskin pendapatan.

Apabila dalam masyarakat terjadi ketidakadilan dalam pembagian kekayaan, maka sebagian anggota masyarakat yang posisinya lemah akan menerima bagian terkecil. Oleh karena itu golongan masyarakat yang lemah menjadi miskin. Bila sebagian anggota masyarakat itu miskin, maka golongan ini akan mempunyai posisi yang lemah dalam menentukan pembagian kekayaan di dalam masyarakat. (H.S. Dillon dan Hermanto, 1993:19).

Kemiskinan disamping merupakan masalah yang muncul dalam masyarakat bertalian dengan pemilikan faktor produksi, produktifitas dan tingkat perkembangan masyarakat sendiri, juga bertalian dengan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan. Dengan kata lain, masalah kemiskinan ini bisa selain ditimbulkan oleh hal yang sifatnya alamiah/cultural juga disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada. (Selo Sumardjan, 1980dalam Arsyad, 2004:238).

Selanjutnya Gunawan Sumodiningrat (1997:78) membedakan kemiskinan kedalam tiga pengertian, yaitu :

# a. Kemiskinan Absolut

Seseorang dikatakan miskin secara absolute apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumhan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Rendahnya tingkat pendapatan itu terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana fisik dan kelangkaan modal atau miskin karena sebab alami.

#### b. Kemiskinan Relatif

Adalah pendapatan seseorang yang sudah diatas garis kemiskinan, namun relative lebih rendah disbanding pendapatan masyarakt sekitarnya. Kemiskinan relatif erat kaitannya dengan masalahpembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan.

#### c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan Kultural ini mengcu pada sikap seseorang atau masyarakat yang (disebabkan oleh factor budaya) tidak mau berurusan untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usha dari pihakluar untuk membantunya.

Adapun ciri-ciri mereka yang tergolong miskin menurut Gunawan Sumodiningrat (1997) adalah :

- Sebagaian besar dari kelompok yang miskin ini terdpat di pedesaan dan mereka ini umumnya buruh tani yang tidak memiliki lahan sendiri. Kaloupun ada yang memiliki tanah luasnya tidak seberapa dan tidak cukup untuk membiayai ongkos hidup yang layak.
- Meraka itu pengangguran atau setengah menganggur. Kalau ada pekerjaan maka sifatnya tidaklah teratur atau pekerjaan tidaklah memberi pendapatan yang memadai bagi tingkat hidup yang wajar.
- 3. Mereka berusaha sendiri, biasanya dengan menyewa peralatan dengan orang lain. Usaha mereka kecil dan terbatas dengan ketiadaan modal.
- Rata-rata semua tidak memiliki peralatan kerja atau modal sendiri.
   Kebanyakan dari mereka tidak berpendidikan, apabila ada, tingkat pendidikannya rendah.
- 5. Mereka kurang berkesempatan untuk memperoleh dalam jumlah yang cukup bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, komunikasi dan fasilitas kesejahteraan sosial pada umumnya (Gunawan Sumodiningrat, 1997:19)

Menurut Mohtar Mas'oed (2003 berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan dalam dua jenis yakni :

# 1. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan ini timbul akibat kelangkaan sumber-sumber daya alam, kondisi tanah yang tandus, tidak ada pengairandan kelangkaan prasarana.

# 2. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan ini timbul akibat munculnya kelembagaan (seringkali akibat modernisasi atau pembangunan itu sendiri) yang membuat anggota masyarakat tiadk dapat mengusai sumber daya, sarana dana fasilitas ekonomi yang ada secara merata (atau disebut juga dengan kemiskinan sruktural) (Mohtar Mas'oed, 2003:138)

Dimensi utama kemiskinan adalah politik, sosial budaya dan psikologi, ekonomi, dan akses terhadap aset. Dimensi tersebut saling terkait dan saling mengunci/membatasi. Kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat pekrjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit akibat kekurangn air bersih. Kemiskinan adalah ketidak

Maka ciri-ciri masyarakat miskin dapat dilihat sebagai berikut :

berdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas (world bank).

- 1. Secara politik : tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka.
- 2. Secara sosial: tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada

- 3. Secara ekonomi : rendahnya kualitas SDM termasuk kesehatan, pendidikan, ketrampilan yang berdampak pada penghasilan.
- 4. Secara budaya dan tata nilai : terperangkap dalam budaya rendahnya kualitas SDM seperti rendahnya etos kerja, berfikir pendek, dan fatalisme.
- 5. Secara lingkungan hidup : rendahnya pemilikan aset fisik termasuk aset lingkungan hidup, seperti air bersih dan penerangan.

Kondisi tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, keamaan, identitas kultural, proteksi, kreasi, kebebasan, partisipasi, dan waktu luang (fernandes, 2000).

Pengertian kemiskinan menurut komite penanggulangan kemiskinan dapat didefinikan sebagai berikut :

- BPS: Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan makannya kurang dari 2.100 kalori per kapita perhari.
- 2. BKKBN: Kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera yang tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, tidak mampu makan 2kali sehari, tidak memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja, dan berpergian, bagian terluas rumah berlantai tanah,dan tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan. Pengertian ini lebih lanjut menjadi keluarga miskin, yakni:
  - a. Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging, ikan/telur.

- Setahun sekali seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian.
- c. Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk tiap penghuni.

Keluarga miskin sekali adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliput :

- a. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- b. Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah,
   bekerja/sekolah, dan berpergian
- c. Bagian lantai tanah yang terluas bukan tanah.
- Bank Dunia : Kemiskinan adalah tidak tercapainya kehidupan yang layak denagn penghasilan US\$ 1 per hari per tahun.

Pada umum definisi kemiskinan adalah pendapatan minimum yang dibutuhkan untuk memperoleh masukan kalori dasar. Salah satu pendekatan yang paling baik dan mengimplementasikan matriks keseluruhan darikemiskinan adalah konsep kebutuhan dasar dari Filipina (ADB, 1999) yang mendefinisikan dalam 3 tingkat hirarki kebutuhan yaitu :

- a. Survival: makanan/gizi, kesehatn, air bersih/sanitasi, pakaian.
- b. Security: rumah, damai, pendpatan, pekerjaan.
- c. Enabling : pendidikan dasr, partisipasi, perawatan keluarga,
   psikososial.

Dari beberapa definisi kemiskinan tersebut, penulisan berpendapat bahwa kemiskinan bukan hanya sekedar ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar saja, kemiskinan juga mencakup aspek sosial dan moral. Misalnya, kurangnya kesempatan berusaha, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat, yang menempatkan mereka pada posisi yang lemah. Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material.

# 2.1.2 Indikator Utama Kemiskinan

Menurut Sahdan (2005) indikator utama kemiskinan adalah:

- (1) Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan
- (2) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan
- (3) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan
- (4) Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha
- (5) Lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah
- (6) Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi
- (7) Terbatasnya akses terhadap air bersih
- (8) Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah
- (9) Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam
- (10) Lemahnya jaminan rasa aman
- (11) Lemahnya partisipasi
- (12) Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga

(13) Tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat

#### 2.1.3 Ciri-Ciri Kemiskinan

Salim (1984: 63) memberikan ciri – ciri kemiskinan sebagai berikut:

- (1) Mereka yang tidak mempunyai faktor produksi sendiri (seperti tanah, modal dan keterampilan)
- (2) Tidak memiliki kemungkinan untuk memiliki asset produksi dengan kekuatan sendiri
- (3) Rata-rata pendidikan mereka rendah
- (4) Sebagian besar mereka tinggal di pedesaan dan bekerja sebagai buruh tani. yang tinggal di kota kebanyakan mereka yang berusia muda dan tidak memiliki keterampilan dan pendidikannya rendah..

Menurut Tumanggor dalam Ismail (1999: 3) ciri-ciri masyarakat yang berpengahasilan rendah / miskin adalah :

- (1) Pekerjaan yang menjadi mata pencarian mereka umumnya merupakan pekerjaan yang menggunakan tenaga kasar.
- (2) Nilai pendapatan mereka lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah jam kerja yang mereka gunakan
- (3) Nilai pendapatan yang mereka terima umumnya habis untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari.

(4) Karena kemampuan dana yang sangat kurang, maka untuk rekreasi, pengobatan, biaya perumahan, penambahan jumlah pakaian semuanya itu hampir tidak dapat dipenuhi sama sekali.

#### 2.1.4 Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai memiliki setidaknya 3 Dimensi (Widodo, 2006:296) antara lain:

#### (1) Kemiskinan Politik

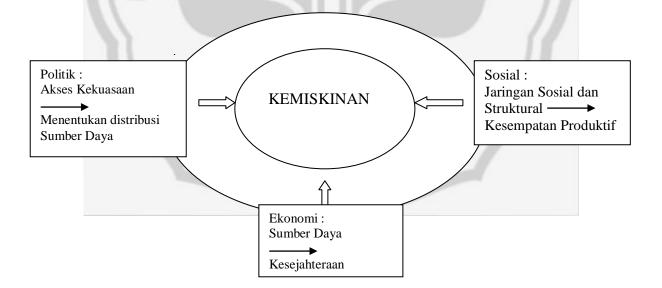
Kemiskinan politik memfokuskan pada derajat akses terhadap kekuasaan (power). Kekuasaan dapat mencakup tatanan sistem sosial politik yang menentukan alokasi sumber daya untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial dan menentukan alokasi sumber daya. Jalan untuk mendapatkan akses tersebut dapat melalui sistem politik formal, kontak-kontak informal dengan struktur kekuasaan yang mempunyai pengaruh pada kekuasaan ekonomi.

# (2) Kemiskinan Sosial

Kemiskinan sosial adalah kemiskinan karena kekurangan jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Dengan kata lain, kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

## (3) Kemiskinan Ekonomi

Kemiskinan dapat diartikan suatu keadaan kekurangan sumber daya (resources) yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang tersedia pada kelompok ini dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku. Sumber daya yang dimaksud dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang luas tidak hanya merupakan pengertian finansial, dalam hal ini kemampuan finansial keluarga untuk memenuhi kebutuhan, tetapi perlu mempertimbangkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih jelas mengenai dimensi kemiskinan dapat dilihat di Gambar 1 dimensi kemiskinan (Widodo, 2006:297).



Gambar 2.1 Dimensi Kemiskinan

#### 2.1.5 Jenis Kemiskinan

Menurut Widodo (2006 : 296 ) kemiskinan sering dibedakan menjadi dua macam yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang timbul akibat sumber daya yang jumlahnya terbatas atau karena tingkat perkembangan teknologi yang rendah. Sedangkan kemiskinan buatan adalah kelembagaan yang ada membuat masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata.

Kemiskinan buatan tersebut kini populer sebagai kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural didefinisikan sebagai kemiskinan yang diderita oleh masyarakat karena struktur sosialnya, sehingga tidak dapat menggunakan sumbersumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan yang dimaksud bukanlah kemiskinan yang dialami seorang individu karena ia malas atau terus menerus sakit. Sedangkan kemiskinan struktural tersebut dapat disebabkan karena keadaan pemilikan sumber yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang dan ketidakseimbangan kesempatan dalam berusaha dan memperoleh pendapatan akan menyebabkan keikutsertaan yang tidak seimbang dalam pembangunan (Arsyad, 1997: 219).

Sementara itu menurut Azhari (1992: 32), menggolongkan kemiskinan kedalam tiga macam kemiskinan yaitu :

#### (1) Kemiskinan alamiah

Kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber daya yang langka jumlahnya, atau karena perkembangan tingkat teknologi yang sangat rendah.

Termasuk didalamnya adalah kemiskinan akibat jumlah penduduk yang melaju dengan pesat di tengah-tengah sumber daya alam yang tetap.

#### (2) Kemiskinan struktural

Kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial sedemikian rupa, sehingga masyarakat itu tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural ini terjadi karena kelembagaan yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Dengan perkataan lain kemiskinan ini tidak ada hubungannya dengan kelangkaan sumber daya alam.

## (3) Kemiskinan kultural

Kemiskinan yang muncul karena tuntutan tradisi / adat yang membebani ekonomi masyarakat, seperti upacara perkawinan, kematian atau pesta pesta adat lainnya.termasuk juga dalam hal ini sikap mentalitas penduduk yang lamban, malas, konsumtif serta kurang berorentasi kemasa depan.

# 2.1.6 Penyebab Kemiskinan

Menurut Kartasasmita dalam Widodo (2006:297) kondisi kemiskinan disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, yaitu:

- (1) Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki.
- (2) Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.

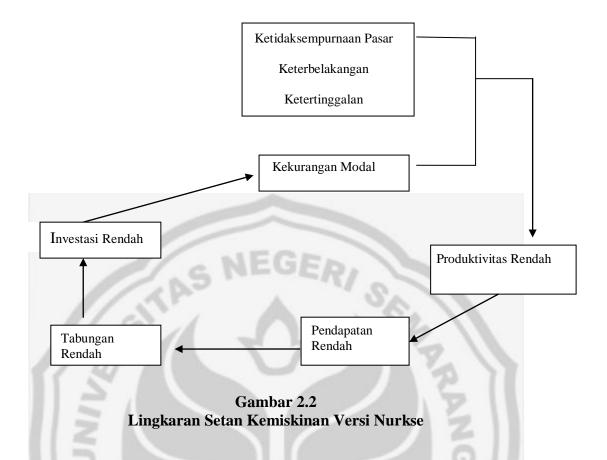
- (3) Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran tersebut.
- (4) Kondisi ketersolasian. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan ,dan gerak kemajuan yang dinikmati oleh masyarakat.

Bank Dunia dalam Sahdan (2005) memaparkan penyebab dasar kemiskinan adalah:

- (1) Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal.
- (2) Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana.
- (3) Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor.
- (4) Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung.
- (5) Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern).
- (6) Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat.
- (7) Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya
- (8) Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*).
- (9) Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Sharp, et.al dalam Kuncoro (2003:131) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinanan muncul karena adanya *ketidaksamaan pola pemilikan sumberdaya* yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam *kualitas sumber daya manusia*. Kualitas sumber daya manusiayang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat *perbedaan akses dalam modal*.

Ketiga kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima.Rendanya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya (Lihat gambar 2). Logika ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, , di tahun 1953 yang mengatakan : "a poor country is poor because it is poor" (negara itu miskin karena dia miskin).



# 2.1.7 Pola Kemiskinan

Kemiskinan juga memiliki pola tersendiri baik antar daerah maupun antar individu/keluarga. Menurut Sumodiningrat dalam Widodo (2006: 298) ada beberapa pola kemiskinan diantaranya sebagai berikut:

- (1) *Presistent Poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun.

  Daerah yang mengalami kemiskinan ini pada umumnya merupakan daerah kritis sumber daya alam atau terisolasi.
- (2) *Cylical Poverty*, yaitu pola kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.
- (3) Seasonal Poverty, yaitu kemiskinan musiman seperti yang sering menjumpai pada kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan.

(4) Accidental Poverty, yaitu kemiskinan karena terjadi bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunannya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

# 2.2 Kesejahteraan

# 2.2.1 Pengertian Kesejarteraan

Menurut BKKBN (Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional), kesejahteraan keluarga digolongan kedalam 3 golongan, yaitu :

Keluarga Sejahtera Tahap I dengan kriteria sebagai berikut:

- (1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama
- (2) Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- (3) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda dirumah / pergi/bekerja / sekolah.
- (4) Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah.
- (5) Anak sakit ataupun pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB dibawa kesarana kesehatan.

Keluarga Sejahtera Tahap II, meliputi :

- (1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama secara teratur
- (2) Paling kurang sekali seminggu lauk daging / ikan / telur
- (3) Setahun terakhir anggota keluarga menerima satu stel pakaian baru
- (4) Luas lantai paling kurang 8 m2 untuk tiap penghuni
- (5) Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan tugas

- (6) Ada anggota keluarga umur 15 tahun keatas berpenghasilan tetap.
- (7) Anggota keluarga umur 10 60 tahun. bisa baca tulis latin
- (8) Anak umur 7 15 tahun. bersekolah
- (9) PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi Keluarga Sejahtera Tahap III, meliputi:
- (1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama
- (2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung
- (3) Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi
- (4) Keluarga sering ikut dalam kegiatan mesyarakat dilingkungan tempat tinggal.
- (5) Keluarga rekreasi bersama paling kurang sekali dalam enam bulan.
- (6) Keluarga memperoleh berita dari surat kabar/majalah/TV/radio.
- (7) Anggota keluarga menggunakan sarana transportasi setempat.

Keluarga Sejahtera Tahap III Plus, meliputi :

- (1) Keluarga secara teratur memberikan sumbangan
- (2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus yayasan / institusi Masyarakat.

# 2.2.2 Indikator Kesejahteraan

Menurut Widodo (2006: 299) indikator kesejahteraan berkait erat dengan kemiskinan karena seseorang digolongkan miskin atau tidak jika seberapa jauh indikator-indikator kesejahteraan tersebut telah terpenuhi. Indikator kesejahteraan dapat dilihat melalui dimensi moneter yaitu pendapatan dan pengeluaran. Disamping itu melalui dimensi moneter, kesejahteraan dapat dilihat melalui

dimensi non moneter misalnya kesehatan, pendidikan dan partisipasi sosial. lebih jelasnya sebagai berikut :

# (1) Dimensi Moneter

Ketika mengukur kesejahteraan melalui dimensi moneter, pendekatan yang bisa dilakukan melalui pendapatan dan konsumsi sebagai indikator kesejahteraan. Diantara pendekatan pendapatan dan konsumsi, menurut Coudoeul, et.al dalam Widodo (2006:299) konsumsi adalah indikator yang lebih baik jika dibandingkan dengan pendapatan dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- (a) Konsumsi saat ini (current consumption) lebih erat hubungannya dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan minimumnya.
- (b) Pendapatan lebih sering berfluktuasi untuk beberapa mata pencaharian tertentu.
- (c) Konsumsi lebih mencerminkan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimumnya.
- (d) Pengeluaran untuk konsumsi tidak hanya mencerminkan barang dan jasa yang dapat diperoleh dengan pendapatannya, tetapi juga kemampuannya untuk memperoleh kredit dan menabung pada saat pendapatannya rendah

dibawah rata-rata

## (2) Dimensi Non Moneter

Kesejahteraan bisaanya diukur melalui dimensi moneter, namun demikian kesejahteraan juga bisa diukur melalui dimensi non moneter. Hal ini terjadi

karena kesejahteraan tidak hanya mencakup dimensi ekonomi saja tetapi juga dimensi non ekonom. Indikatornya sebagai berikut :

## (a) Indikator nutrisi dan kesehatan

Status kesehatan anggota rumah tangga dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan. Selain kesehatan anggota rumah tangga, indikator kesehatan ini dapat diproduksi melalui pusat-pusat kesehatan, akses terhadap kesehatan, vaksinasi, dan lain-lain. Indikator kesehatan ini juga berkaitan dengan kebutuhan dasar yang telah dipenuhi oleh seseorang yang tidak hanya meliputi kebutuhan dasar lain yaitu kebutuhan terhadap rumah sehat, akses terhadap air bersih, dan lain-lain.

# (b) Indikator pendidikan

Indikator pendidikan ini dapat diproduksi melalui tingkat melek huruf, lamanya pendidikan yang ditempuh, pendidikan terakhir anggota rumah tangga, dan lain-lain. Pendidikan ini berkaitan dengan *human capital* yang merupakan nilai tambah bagi orang tersebut untuk terlibat aktif dalam perekonomian.

# (c) Indikator partisipasi sosial

Peran serta anggota keluarga dalam kegiatan kemasyarakatan merupakan cermin dari kesejahteraan rumah tangga dan merupakan aktualisasi dalam masyarakat.

# 2.3 Strategi dan Kebijakan Dalam Menanggulangi Kemiskinan

# 2.3.1 Strategi Menanggulangi Kemiskinan

# (1) Pembangunan Sektor Petanian

Sektor pertanian memiliki peranan penting di dalam pembangunan karena sektor tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masayrakat di pedesaan berarti akan mengurangi jumlah masyarakat miskin. Terutama sekali teknologi disektor pertanian dan infrastruktur.

# (2) Pembangunan Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan investasi insani yang memerlukan biaya yang cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyrakat secara umum, maka dari itu peningkatan lembaga pendidikan, kesehatan dan gizi merupakan langka yang baik untuk diterapkan oleh pemerintah.

# (3) Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat

Mengingat LSM memiliki fleksibilitas yang baik dilingkungan masyarakat sehingga mampu memahami komunitas masyarakat dalam menerapkan rancangan dan program pengentasan kemiskinan.

# 2.3.2 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah telah mencanangkan dua pokok kebijaksanaan pembangunan yaitu:

- (1) Mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
- (2) Melaksanakan pemerataan yang meliputi :
- (a) Pemerataan pembagian pendapatan

- (b) Penyebaran pembangunan di seluruh daerah
- (c) Kesempatan memperoleh pendidikan
- (d) Kesehatan
- (e) Kesempatan kerja

# 2.3.3 Program Strategis

Menurut Sahdan (2005) program strategis yang dapat dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan di desa adalah:

- (1) Membuka peluang dan kesempatan berusaha bagi orang miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi. Pemerintah harus menciptakan iklim agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, terutama oleh penduduk miskin. Karena itu, kebijakan dan program yang memihak orang miskin perlu difokuskan kepada sektor ekonomi riil (misalnya: pertanian, perikanan, manufaktur, usaha kecil menengah), terutama di sektor informal yang menjadi tulang punggung orang miskin. Agar pertumbuhan ekonomi ini berjalan dan berkelanjutan, maka di tingkat nasional diperlukan syarat:
  - (a) Stabilitas makro ekonomi, khususnya laju inflasi yang rendah dan iklim sosial politik dan ekonomi yang mendukung investasi dan inovasi para pelaku ekonomi. Secara garis besar hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah pusat
  - (b) Diperlukan kebijakan yang berlandaskan paradigma keberpihakan kepada orang miskin agar mereka dapat sepenuhnya memanfaatkan kesempatan yang terbuka dalam proses pembangunan ekonomi

- (c) Memberikan prioritas tinggi pada kebijakan dan pembangunan sarana sosial dan sarana fisik yang penting bagi masyarakat miskin, seperti jalan desa, irigasi, sekolah, air minum, air bersih, sanitasi, pemukiman, rumah sakit, dan poliklinik di tingkat nasional maupun daerah.
- (2) Kebijakan dan program untuk memberdayakan kelompok miskin. Kemiskinan memiliki sifat multidimensional, maka penanggulangannya tidak cukup hanya dengan mengandalkan pendekatan ekonomi, akan tetapi juga mengandalkan kebijakan dan program di bidang sosial, politik, hukum dan kelembagaan. Kebijakan dalam memberdayakan kelompok miskin harus diarahkan untuk memberikan kelompok miskin akses terhadap lembagalembaga sosial, politik dan hukum yang menentukan kehidupan mereka. Untuk memperluas akses penduduk miskin diperlukan
  - (a) Tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama birokrasi pemerintahan, lembaga hukum, dan pelayanan umum lainnya.
  - (b) Dalam tatanan pemerintahan diperlukan keterbukaan, pertanggungjawaban publik, dan penegakan hukum, serta partisipasi yang luas masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan.
- (3) Kebijakan dan program yang melindungi kelompok miskin. Kelompok masyarakat miskin sangat rentan terhadap goncangan internal (misalnya kepala keluarga meninggal, jatuh sakit, kena PHK) maupun goncangan eksternal (misalnya kehilangan pekerjaan, bencana alam, konflik sosial), karena tidak memiliki ketahanan atau jaminan dalam menghadapi

goncangan-goncangan tersebut. Kebijakan dan program yang diperlukan mencakup upaya untuk :

- (a) Mengurangi sumber-sumber resiko goncangan
- (b) Meningkatkan kemampuan kelompok miskin untuk mengatasi goncangan.
- (c) Menciptakan sistem perlindungan sosial yang efektif.
- (4) Kebijakan dan Program untuk memutus pewarisan kemiskin antar generasi, hak anak dan peranan perempuan. Kemiskinan seringkali diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, rantai pewarisan kemiskinan harus diputus. Meningkatkan pendidikan dan peranan perempuan dalam keluarga adalah salah satu kunci memutus rantai kemiskinan.
- (5) Kebijakan dan program penguatan otonomi desa. Otonomi desa dapat menjadi ruang yang memungkinkan masyarakat desa dapat menanggulangi sendiri kemiskinannya. Kadang-kadang pemerintah menganggap bahwa yang dibutuhkan masyarakat miskin adalah sumber-sumber material bagi kelangsungan hidup penduduk miskin. Anggapan tersebut, tidak selamanya benar, karena toh dalam kondisi tertentu, masyarakat desa yang miskin dapat keluar dari persoalan kemiskinan tanpa bantuan material pemerintah. Inisiatif dan kreativitas mereka dapat menjadi modal yang berharga untuk keluar dari lilitan kemiskinan. Otonomi desa merupakan ruang yang dapat digunakan oleh masyarakat desa untuk mengelola inisiatif dan kreativitas mereka dengan baik, menjadi sumber daya yang melimpah untuk keluar dari jeratan kemiskinan.

## 2.4 Konsep Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

# 2.4.1 Tujuan

- (1) Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan berkelanjutan, yang aspiratif, representatif, mengakar, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, mampu memperkuat aspirasi/suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal, dan mampu menjadi wadah sinergi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di wilayahnya.
- (2) Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), termasuk membangun kerjasama dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait, dengan menciptakan kepercayaan pihak-pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat (BKM).

# 2.4.2 Kelompok Sasaran

Pada dasarnya, kelompok sasaran P2KP mencakup empat sasaran utama, yakni masyarakat, pemerintah daerah, kelompok peduli setempat dan para pihak terkait (*stakeholders*). Dibutuhkan kerjasama yang baik antara masing-masing pihak untuk mendukung kelancaran pelaksanaan P2KP, sehingga tujuan dari P2KP dapat tercapai. Dalam perjalanan P2KP sudah terbentuk 6.405 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang tersebar di 1.123 kecamatan di 235 kota dan Kabupaten, serta 291.000 relawan masyarakat.

# 2.4.3 Strategi Pelaksanaan

Agar terwujud tujuan yang hendak dicapai, maka strategi yang dilaksanakan adalah:

- (1) Mendorong Proses Transformasi Sosial dari Masyarakat Tidak Berdaya/Miskin Menuju Masyarakat Berdaya
- (a) Penguatan Lembaga Masyarakat melalui pendekatan pembangunan bertumpu pada kelompok (Community based Development)
- (b) Pembelajaran Penerapan Konsep Tridaya dalam Penanggulangan Kemiskinan
- (c) Penguatan Akuntabilitas Masyarakat
- (2) Mendorong Proses Transformasi Sosial dari Masyarakat Berdaya Menuju Masyarakat Mandiri
- (a) Pembelajaran Kemitraan antar Stakeholders Strategis,
- (b) Penguatan Jaringan antar Pelaku Pembangunan
- (3) Mendorong Proses Transformasi Sosial dari Masyarakat Mandiri Menuju Masyarakat Madani

Intervensi P2KP untuk mampu mewujudkan transformasi dari kondisi masyarakat mandiri menuju masyarakat madani lebih dititikberatkan pada proses penyiapan landasan yang kokoh melalui penciptaan situasi dan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya masyarakat madani, melalui intervensi komponen Pembangunan Lingkungan Permukiman Kelurahan Terpadu (Neighbourhood Development), yakni proses pembelajaran masyarakat dalam mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berbasis nilai

menuju terwujudnya lingkungan permukiman yang tertata, sehat, produktif dan lestari.

# 2.5 Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bergulir P2KP

# 2.5.1 Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemanfaatan

Adapun pedoman petunjuk pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan dan bergulir P2KP ersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Unit Pengelola Keuangan (UPK) merupakan satu-satunya pengelola administrasi BKM, sementara pengambilan keputusan tetap menjadi wewenang BKM. Selama masa proyek, BKM tidak diperkenankan membentuk unit usaha lain yang bertindak sebagai pengelola keuangan selain UPK.
- (2) Seluruh dana bergulir yang berasal dari BLM harus dikelola oleh UPK. Dana tersebut dimaksudkan untuk membiayai KSM berikut yang telah dinyatakan layak oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) selama masih bekerja. Untuk itu, pelayanan UPK agar mengenakan pendekatan pembentukan KSM sehingga pelayanan individu oleh UPK tidak diperkenankan.
- (3) KSM yang dapat menerima dana bergulir adalah:
- (a) KSM baru yang belum pernah memperoleh pembiayaan P2KP baik untuk kepentingan usaha/ ekonomi maupun untuk prasarana pisik (prioritas).

- (b) KSM lama yang sudah melunasi pinjaman dan mempunyai catatan pengembalian yang baik dan masih membutuhkan modal untuk pengembalian lebih lanjut.
- (c) KSM lama dimana pencairan tahap sebelumnya belum dapat memenuhi pelayanan pinjaman kepada semua anggotanya.
- (d) Selain hal tersebut di atas, dana bergulir dapat dipergunakan untuk kepentingan pelatihan baik berupa hibah maupun berupa pinjaman, tergantung jenis, tujuan serta penerima manfaat tujuan tersebut. Hal ini diusulkan oleh KSM sesuai dengan aturan yang ada di dalam manual.
- (4) Selama KMW masih bekerja, semua usulan dari KSM yang akan menanfaatkan dana bergulir tetap harus diajukan kepada KMW melalui Faskel. Sebagian besar dana Bantuan Langsung ke Masyarakat (BLM) yang disalurkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ke Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) usaha / ekonomi maupun untuk kepentingan pelatihan sudah dibayar kembali ke masyarakat melalui KSM. Kemajuan perkembangan terakhir ini sesuai dengan tujuan P2KP.
- (5) Usulan kegiatan KSM yang telah dinilai layak oleh KMW tetap diserahkan kepada BKM untuk membuat skala prioritas dan membuat berita acara yang harus diketahui dan ditandatangani oleh Faskel.
- (6) Usulan kegiatan KSM yang telah dinilai layak dan memperoleh prioritas BKM segera ditindaklanjuti oleh UPK tanpa melalui Penanggungjawab Operasional Kecamatan (PJOK) maupun KPKN. Meskipun demikian dianjurkan untuk melaporkan kemajuan kepada PJOK.

- (7) Dalam rangka pengelolaan dana bergulir ini, tidak diwajibkan lagi dana insentif 2 persen untuk Faskel yang berasal dari dana bergulir tersebut. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- (8) Tanggungjawab pengelolaan dana bergulir berada di tangan BKM dan dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota lengkap BKM. Diharapkan petunjuk pengelolaan dan pemanfaatan dana bergilir P2KP dapat dijadikan sebagai acuan bagi Konsultan Manajemen Pusat (KMP) maupun KMW.

# 2.5.2 Kriteria Penerima Dana P2KP

Kriteria bagi berhak menerima dana bantuan P2KP adalah:

(1) Memiliki Kartu Identitas Penduduk (KTP)

Dengan memiliki KTP, maka dapat dibuktikan sebagai penduduk yang tinggal di dalam wilayah pemerintah daerah setempat. Jika terdapat anggota masyarakat yang tidak memiliki KTP karena berbagai alasan, tetapi keberadaan dan eksistensinnya dapat diterima oleh warga setempat, maka atas persetujuan BKM dapat didaftarkan menjadi penerima dana bantuan P2KP.

(2) Kepala Keluarga Tidak Memiliki Pekerjaan/Tidak Tetap

Seorang Kepala Keluarga yang tidak memiliki pekerjaan atupun tidak tetap dapat didaftarkan menjadi penerima dana P2KP karena penghasilan yang diterima tidak dapat mencukupi kebutuhan anggota keluarganya.

(3) Istri Tidak Memiliki Pekerjaan/Tidak Tetap

Seorang istri merupakan penndamping kepala keluarga dan mempunyai kewajiban untuk membantu kepala keluarga dapat memenuhi kebutuhan

anggota keluarganya, istri yang tidak memiliki pekerjaan dapat didaftarkan sebagai penerima dana P2KP.

# (4) Jumlah Tanggungan Dalam Keluarga Banyak

Semakin banyak jumlah anggota kelurga, semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, jumlah tanggungan dalam keluarga banyak namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka keluarga tersebut dapat didaftarkan menjadi penerima dana P2KP.

# (5) Tidak Memiliki Rumah Sendiri

Keluarga yang tidak memiliki rumah sendiri dapat digolongkan dalam penerima dana P2KP karena tidak dapat memenuhi salah satu kebutuhan primer, yaitu kebutuhan papan (memiliki tempat tinggal sendiri).

# (6) Kondisi Rumah/Tempat Tinggal

Kondisi rumah/temapt tinggal mencerminkan kondisi ekonomi dalam suatu keluarga, kondisi rumah tidak layak huni dapat didaftarkan menjadi penerima dana P2KP.

# 2.6.2 Komponen-Komponen Program yang didanai P2KP

Komponen-komponen program yang didanai P2KP adalah:

# (1) Komponen Fisik

Komponen fisik meliputi pemeliharaan, perbaikan, maupun pembangunan sarana dan prasarana dasar lingkungan yang dibutuhkan masyarakat kelurahan setempat. Beberapa jenis komponen fisik yang dapat diusulkan, misalnya:

- (a) Perbaikan dan peningkatan jalan dan lingkungan
- (b) Ruang terbuka hijau atau taman
- (c) Sarana dan prasarana bagi peningkatan ekonomi masyarakat
- (d) Komponen-komponen lain yang disepakati bersama, kecuali pembangunan dan perbaikan rumah ibadah.

# (2) Komponen kegiatan Ekonomi Skala Kecil

Kegiatan ekonomi skala kecil meliputi kegiatan industri rumah tangga atau kegiatan usaha kecil lainnya yang dilakukan perseorangan/keluarga miskin yang menghimpun diri dalam KSM. Tidak ada pembatasan dalam jenis usaha dalam mempeoleh kredit tambahan modal usaha, pendepositoan di lembaga keuangan, produksi/penjualan obat terlarang, senjata dan barang-barang yang berbahaya bagi lingkungan, pembebasan lahan serta pembiayaan administrasi pemerintah.

# (3) Komponen Pelatihan

Kegiatan pelatihan dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan warga kelurahan setempat. Pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial ini dimaksudkan untuk mendukung upaya

penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

#### 2.6.3 Alokasi Dana dan Sumber Dana P2KP

Alokasi dana BLM P2KP kepada kelurahan/desa di lokasi kota/kabupaten terpilih akan dilakukan melalui mmekanisme penganggaran yang biasa dilakukan oleh pemerintah pusat. Jumlah dana BLM yang danai oleh pemerintah pusat

sebesar 50 % dari total dana BLM yang disetujui, sedangkan 50 % sisa dana BLM harus didanai oleh pemerintah Kota/Kabupaten melalui alokasi dana APBD. Adapun besarnya dana BLM dapat dlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Alokasi Dana BLM Program P2KP

Kategori	Ukuran Kelurahan/ Desa					
	Kecil		Sedang	Besar		
Jumlah Penduduk	< 3.000 jiwa		3.000 s.d.	> 10.000 jiwa		
Miskin	NEGFO.		10.000 jiwa			
Jumlah KK	< 300 KK	≥ 300 KK	< 1000 KK	≥1000 KK		
Miskin	1		0.4 /1			
Jumlah Penduduk	≥ 10 % dari total jumlah penduduk					
Miskin	///	1 1-	1.2			
Jumlah Alokasi	Rp 75 juta	Rp 125 juta	Rp 175 juta	Rp 225 juta		
Dana BLM			1 A 3	711		

Sumber: Pedoman Khusus Replikasi P2KP (2006)

# 2.6.4 Sumber Pendanaan

Pelaksanaan kegiatan P2KP ini dukung oleh berbagai sumber pendanaan seperti yang tercantum dibawah ini :

- (1) Pengadaan Konsultan Pelaksanan Daerah didanai oleh Pemkot/Kabupaten setempat
- (2) Pengadaan KMW di tingkat propinsi didanai oleh Pemerintah Pusat
- (3) Dana BLM Replikasi didanai secara bersama-sama (Sharing) oleh Pemkot/Kabupaten dan Pemerintah Pusat dengan ketentuan 50 : 50
- (4) BOP untuk Tim Pelaksana kegiatan (TPK), Kecamatan (PJOK Replikasi) dan Kelurahan didana oleh Pemkot/Kab setempat

## 2.7 Struktur Organisasi Pelaksanaan P2KP

Dalam pelaksanaan P2KP dibentuk struktur organisasi yang terdiri dari tim koordinasi dari tingkat pusat hingga tingkat bawah, yaitu sebagai berikut :

# (1) Tingkat Nasional

Penanggungjawab pengelolaan program tingkat nasional adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, yang bertindak sebagai penyelenggara program (executing agency) yang dibantu oleh Satker P2KP (PMU) sebagai penanggungjawab operasional kegiatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut PMU dibantu oleh 2 (dua) Konsultan Manajemen Pusat (KMP) P2KP yang bertugas melakukan pengawasan, pengkoordinasian dan pengendalian KMW-KMW (Konsultan Manajemen Wilayah) sesuai pembagian wilayah dampingan pada pelaksanaan P2KP2 dan P2KP3.

# (2) Tingkat Propinsi

Di tingkat propinsi dikoordinasikan langsung oleh Gubernur setempat melalui Bappeda Propinsi dengan menunjuk Tim Koordinasi Pelaksanaan P2KP (TKPP) tingkat propinsi atau TKPK yang sudah ada. Pelaksana tingkat Propinsi adalah Dinas Pekerjaan Umum/ Bidang Ke-Cipta Karya dibawah kendali/koordinasi Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) PBL tingkat propinsi. Dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan akan dilakukan oleh KMW yang ditugasi oleh Satker/PMU P2KP untuk Propinsi tersebut.

# (3) Tingkat Kabupaten/Kota

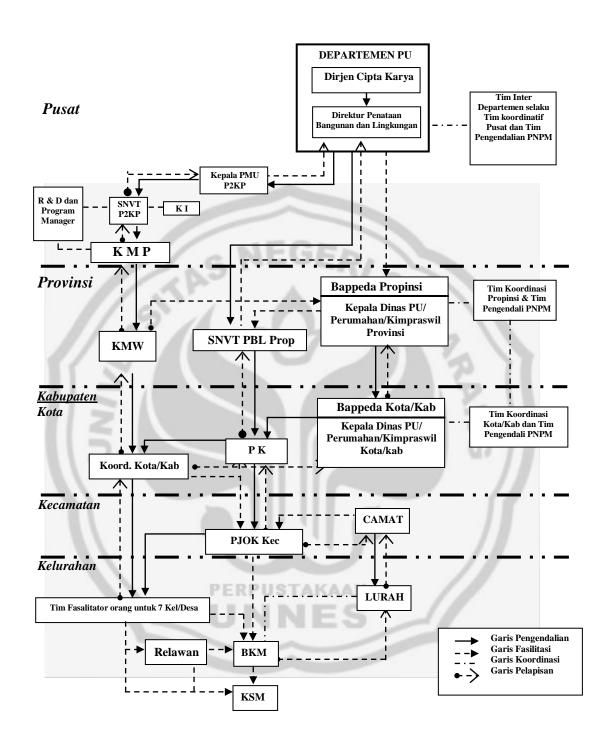
Di tingkat kota/kabupaten dikoordinasikan langsung oleh Bupati/Walikota setempat melalui Bappeda Kota/Kabupaten dengan menunjuk Tim Koordinasi Pelaksanaan PNPM P2KP (TKPP) tingkat kota/kabupaten atau TKPK yang sudah ada. Pemkot/kab dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat Menteri PU atas usulan Bupati/Walikota dibawah koordinasi SNVT PBL Propinsi dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pencairan dana BLM.

# (4) Tingkat Kecamatan

Di tingkat kecamatan akan ditunjuk PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan). PJOK adalah perangkat kecamatan yang diangkat oleh Kepala Satker P2KP atas usulan walikota/bupati untuk pengendalian kegiatan ditingkat kelurahan dan berperan sebagai penanggungjawab administrasi pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya

# (5) Tingkat Kelurahan/Desa

Pada tingkat kelurahan/desa, P2KP akan memanfaatkan BKM yang ada atau membentuk BKM baru dengan fungsi utama mengkoordinasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, mengakomodasikan berbagai masukan pembangunan untuk wilayahnya serta membentuk Unit-Unit pelaksana dan mengorganisir relawan-relawan dari warga setempat.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Pelaksanaan P2KP

## 2.8 Kerangka Berfikir

Kemiskinan telah menjadi persepsi masyarakat yang menilai kemiskinan hanya dari sisi ekonomi semata (pendapatan). Penilaian ini sangat kurang arif ketika kemiskinan hanya dimaknai secara parsial dan tidak utuh. Pengangguran, pendapatan rendah, kurang modal, tidak adanya akses, tidak ada pekerjaan tetap, lapangan pekerjaan dituding sebagai biang lahirnya sebuah kemiskinan di masyarakat pada umumnya dan di perkotaan pada khususnya.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) lahir atas tuntutan sejarah. Denyut nadi kebangsaan yang kian hari semakin berada pada titik nadir, menjadi potret kebangsaan yang harus ditangani secara serius dan konsisten. Pada tahun 1999 P2KP lahir sebagai wujud nyata komitmen pemerintah untuk mengakhiri kemiskinan. P2KP sebagai salah satu langkah alternate dalam memecahkan problem kebangsaan, utamanya masalah kemiskinan.

Untuk menanggulangi kemiskinan,dibutuhkan pemahaman yang utuh tentang kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan bukan hanya soal tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi termajinalisasi orang - orang miskin sehingga berada pada posisi yang tidak berdaya. Kemiskinan terdiri dari beberapa definisi yang mengakibatkan adanya perbedaan strategi penanggulangan kemiskinan, tergantung definisi mana yang melekat pada kondisi masyarakat miskin yang dituju. Untuk mengkaji apa penyebab masalah masyarakat dan apa kebutuhan masyarakat miskin yang menjadi sasaran. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki- laki dan perempuan, tidak mampu

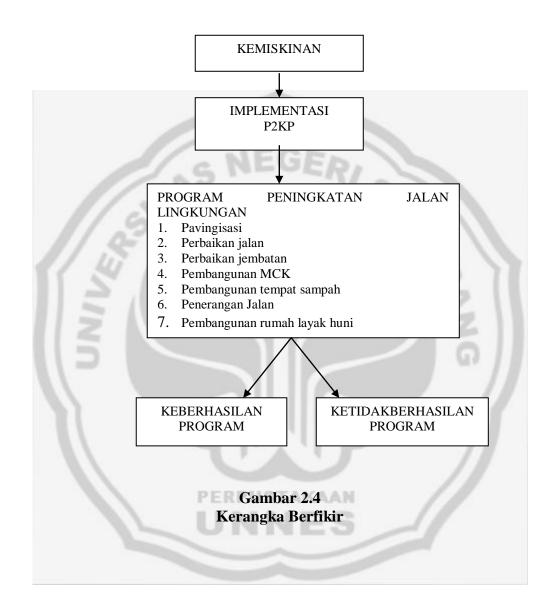
memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermanfaat (Bappenas, 2004).

Implementasi P2KP di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal menitikberatkan pada program peningkatan jalan lingkungan karena banyak sekali jumlah jalan desa yang mengalami kerusakan dan belum mempunyai jalan, untuk mengatasi masalah tersebut dalam hal ini dilakukan program pavingisasi dan rabat beton jalan desa di Desa Blorok dan Desa Brangsong. Program ini bertujuan untuk memperlancar transportasi masyarakat terutama masyarakat miskin sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam menjalankan kegiatan ekonomi sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Program ini dilaksanakan hampir di seluruh wilayah RW di Desa Blorok dan Desa Brangsong Kecamatan Brangsong. Program ini dijalankan oleh BKM yang dibantu oleh KSM yang berada di masing-masing wilayah RW. Program ini juga dibantu oleh swadaya masyarakat dalam bentuk uang maupun dalam bentuk tenaga untuk mengerjakan program ini. Dengan adanya kerjasama antara Pemda Brebes, BKM, KSM dan Masyarakat miskin maka implementasi P2KP akan dapat berjalan dengan maksimal.

Keberhasilan dan ketidakbeberhasilan implementasi P2KP dilihat dari besar kecilnya manfaat dari program tersebut yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin dan dilihat dari tingkat implementasi program yang dilaksanakan di semua wilayah RW.

Untuk lebih memperjelas kerangka berfikir dapat dijelaskan dalam gambar kerangka berfikir.



#### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

# 3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. (Suharsimi, 2006:130). Sedangkan menurut Sudjana (dalam metoda statistik, 2001:16) populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil hitung maupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga yang dikategorikan miskin yang ada di Desa Blorok dan Desa Brangsong, yang berjumlah 390 kepala keluarga yang tersebar dalam 6 RW dan 12 RT untuk Desa Blorok dan yang berjumlah 545 kepala keluarga yang tersebar dalam 8 RW dan 24 RT untuk Desa Brangsong, populasi total dalam penelitian ini sebanyak 936 kepala keluarga miskin.

## 3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi,2006:131). Sedangkan menurut Sudjana (2001:161), sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dari populasi yang menggunakan cara-cara tertentu. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode area proporsional random sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan wilayah di masing-masing bagian secara acak penentuan sampel dihitung dengan rumus (Slovin dalam Husein, 1998: 78-79):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{936}{1 + (936)(0,01)}$$

$$n = \underline{936}$$
 $13,52$ 

n = 90

Di mana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e<sup>2</sup> = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan

Dengan demikian, pengambilan sampel sebanyak 90 kepala keluarga sudah dianggap representatif. Adapun Perincian jumlah sampel yang diambil dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Table 3.1 Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Brangsong

Wilayah	RW	Populasi	%	Sampel
Blorok	1	79	8.44	8
	2	65	6.94	6
	3	93	9.93	9
	4 PE	62	6.62	6
. 10 /	5	45	4.80	4
	6	46	4.91	4
Brangsong	1	71	7.58	7
	2	205	21.90	21
	3	70	7.47	7
	4	45	4.80	4
	5	36	3.84	3
	6	28	2.99	3
	7	46	4.91	4
	8	42	4.48	4
Jumlah		936	100	90

## 3.3 Variabel Penelitian

Dalam suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum pengumpulan data. Variabel merupakan objek atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006:118). Variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Profil keluarga miskin, yaitu menggambarkan kondisi keluarga miskin yang berada di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.
- 2. Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yaitu pelaksanaan P2KP di Kecamatan Brangsong dengan Indikator pengukur sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan kegiatan lingkungan (fisik)
  - b. Gambaran umum Implementasi P2KP
  - c. Sasaran program
  - d. Tahapan dan pelaksanaan program
  - e. Jumlah dana yang dialokasikan
  - f. Tahapan penyaluran dana
  - g. Realisasi penyaluran dana
  - h. Pelaksanaan Program penanggulangan kemiskinan selain P2KP
- Tingkat keberhasilan implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dengan indikator pengukuran;
  - a. Penilaian keberhasilan menurut warga
  - b. Tingkat implementasi program

# 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang baik dan tepat sangatlah penting dalam mempengaruhi hasil penelitian. Pemilihan metode yang tepat akan diperoleh data yang tepat, relevan, dan akurat, sehingga dalam mencapai tujuan penelitian dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu:

# 1. Metode Kuesioner

Menurut Arikunto (2006:193) metode kuisioner merupakan suatu daftar pertanyaan tertulis atau angket yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Metode ini digunakan untuk mengetahui profil Keluarga miskin, Implementasi P2KP dan Tingkat keberhasilan implementasi P2KP di kecamatan Brangsong Kebupaten Kendal.

## 2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber pada benda tertulis (Arikunto,2002:206). Dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data-data berupa informasi berupa jumlah keluarga miskin, kondisi jalan lingkungan dan jumlah BKM serta KSM di Desa Blorok dan Desa Brangsong, selain data-data laporan tertulis, untuk penelitian ini juga digali berbagai data, informasi dan referensi dari berbagai sumber pustaka, media masa dan internet.

## 3. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan responden. Dalam metode ini, instrumen pertanyaan bertindak sebagai pedoman wawancana. Pedoman wawancara ini dibuat terstruktur seperti halnya kuesioner, sehingga memudahkan peneliti untuk memperoleh data yang diinginkan (Arikunto,2002:202).

Dalam pelaksanaan penelitian penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait yaitu Kantor Kecamatan Brangsong, Kepala BKM Bina Sejahtera Desa Blorok dan Ketua BKM Mas Desa Brangsong.

# 3.5 Validitas dan Reliabilitas

# 1. Validitas

Validitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen (Suharsimi, 2006 : 170). Untuk menguji kesahihan dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa butir dengan mengkoreliskan skor-skor yang ada dengan skor-skor total. Skor-skor pada butir dianggap sebagai nilai X dan Y, kemudian rumus yang digunakan :

$$\mathbf{r}_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

Keterangan:

$$x = X - \overline{X}$$

$$y = Y - \overline{Y}$$

X = skor rata-rata dari X

Y = skor rata-rata dari Y

Pengujian validitas dilakukan pada 90 kuesioner yang ditujukan kepada 90 responden untuk menguji tingkat validitas dari setiap item pertanyaan kuisioner. Uji signifikasi dilakukan dengan membandingkan nilai R-hitung dengan nilai R-table. Suatu data dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari r tabel.

Secara statistik, angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka kritis tabel korelasi r tabel. Jika angka korelasi suatu pertanyaan berada diatas angka kritis, maka pertanyaan tersebut signifikan. Hal ini berarti bahwa perhitungan tersebut mewakili validitas konstruk. Sebaliknya jika angka korelasi pertanyaan berada dibawah angka kritis, maka pertanyaan tersebut tidak signifikan yang berarti bahwa pertanyaan tersebut tidak valid.

Untuk mempermudah analisis data, uji validitas akan dilakukan dengan bantuan program SPSS ( *Statistical Program For Science* ).

# 2. Reliabilitas

Dalam menghitung reliabilitas dalam penelitian menggunakan rumus *Alpha*., dengan menggunakan rumus :

$$r_{11} = (\frac{k}{(k-1)})(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2})$$
 (Suharsimi, 2006 : 196)

Keterangan:

r<sub>11</sub> : reliabilitas instrumen

k : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

 $\sum {\sigma_{b}}^{2}$  : jumlah varians soal

 $\sigma_t^2$ : varia ns total

Indikator diangggap reliable jika r $\alpha$  > r tabel = 0,6 (Ghozali: 2005). Untuk mempermudah analisis data, uji reliabilitas akan dilakukan dengan bantuan program SPSS.

# 3.6 Metode Analisis Data.

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

# 1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah analisis untuk menggambarkan atau untuk menjelaskan hasil penelitian dan penjelasan tentang teori-teori yang bersangkutan dengan uraian masalah yang diambil dalam penelitian ini yang hanya dapat dijelaskan dengan kata-kata atau kalimat.

Analisis kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil jawaban responden atas kuisioner yang telah disebar. Analisis dalam penelitian ini berupa analisis terhadap masing-masing pertanyaan yang ada dalam kuisioner, yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh persepsi pelanggan.

# 2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis data yang dilakukan dengan angka-angka dan perhitungannya.

# 3. Deskriptif Persentase

Metode analisa yang digunakan adalah dengan tehnik deskriptif persentase. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Analisis deskripsi dapat dilengkapi dengan penggambaran secara persentase atau tabel.



#### **BAB IV**

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil Penelitian

# 4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Secara geografis, Kabupaten Kendal terletak antara 1090 40' – 1100 18' Bujur Timur dan antara 60 32' – 70 24' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang.

Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah 1002,23 KM2 yang terdiri dari 20 kecamatan dan terbagi menjadi 265 desa dan 20 kelurahan. Berdasarkan hasil olah cepat Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Kendal adalah 900.611 jiwa, yang terdiri atas 457.237 laki-laki dan 443.374 perempuan. Kecamatan Boja, Kaliwungu, Sukorejo dan Weleri merupakan 4 kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, masingmasing berjumlah 69.539 jiwa, 58.470 jiwa, 57.179 jiwa dan 55.718 jiwa. Sedangkan Kecamatan Kota Kendal sebagai ibukota Kabupaten Kendal memiliki penduduk sejumlah 54.083 jiwa hampir sama dengan jumlah penduduk di Kecamatan Patebon sejumlah 54.699 jiwa.

Dengan luas wilayah Kabupaten Kendal sekitar 1.002,23 Km2 yang didiami oleh 900.611 jiwa maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk

Kabupaten Kendal adalah sebanyak 899 jiwa/Km2. Kecamatan Kota Kendal merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu mencapai 1.967 jiwa/Km2, sedangkan Kecamatan Singorojo merupakan daerah dengan tingkat kepadatan terendah yaitu sekitar 392 jiwa/Km2. Sex ratio penduduk Kabupaten Kendal adalah sebesar 103,13 persen yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki 3,13 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Kendal Tahun 2000 – 2010 adalah sebesar 0,59 persen. Laju Pertumbuhan Penduduk tertinggi ada di Kecamatan Boja sebesar 1,40 persen dan terendah di Kecamatan Plantungan sebesar 0,06 persen Jumlah rumah tangga berdasarkan hasil SP2010 adalah 245.246 rumah tangga. Dengan jumlah penduduk sebesar 900.611 jiwa, ini berarti bahwa banyaknya penduduk yang menempati satu rumah tangga dari hasil SP2010 rata-rata sebanyak 3.67 jiwa. Rata-rata anggota rumah tangga yang terendah adalah kecamatan Ringinarum sebesar 3,33 dan yang teRWinggi di Kecamatan Kaliwungu sebesar 3,97.

# 4.1.2 Responden

## 1. Usia

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan usia keluarga miskin di Kecamatan Brangsong sebagai berikut :

Tabel 4.1 Kepala Keluarga Miskin di Kecamatan Brangsong dirinci Berdasarkan usia

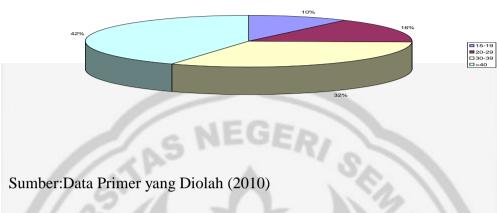
1	<b>E</b> CCamatan	i Di angson	g uninci b	et uasai kan	usia	
Wilayah	RW	Usia kepala Keluarga (tahun)				Total
(Desa)		15-19	20-29	30-39	>40	
Blorok	1	1	1	1	2	5
	2	2	0	3	0	5
	3	0	0	1	2	3
	4	1	2	2	2	7
	5	2	$\sim 1$	5	1	9
	6	0	1	3	4	8
Brangsong	11/	0	0	3	4	7
	2	0	15/	5	1	7
	3	1	2	0	4	7
	4	0	2	2	3	7
	5	0	0	3	3	6
	6	0	0	1	5	6
	7	2	3	1	2	8
	8	0	1	0	4	5
KK		9	14	29	38	90
Persentase (%)		10,00	15,55	32,22	42,22	100

Sumber: Data Primer yang Diolah (2010)

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa kepala keluarga miskin yang berusia antara 15-19 tahun sebanyak 9 orang (10,00 %), antara usia 20-29 tahun sebanyak 14 orang (15,55 %), antara usia 30-39 tahun sebanyak 29 orang (32,22 %), dan usia lebih dari 40 tahun sebanyak 38 orang (42,22 %). Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga miskin berusia lebih dari 50 tahun. Hal ini berdampak pada kemampuan fisik dan stamina dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

Adapun gambar diagram menurut data diatas adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1 Kepala Keluarga Miskin di Kecamatan Brangsong dirinci Berdasarkan usia



# 2. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa tingkat pendidikan keluarga miskin di Kecamatan Brangsong sebagai berikut:

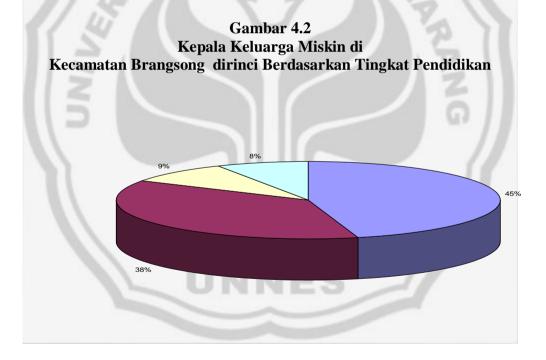
Tabel 4.2
Kepala Keluarga Miskin di
Kecamatan Brangsong dirinci Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kccam	atan Di	angsong (	minci Dei ua	sarkan ringk	at I enuluikan	
Wilayah	RW	Tingkat Pendidikan				Total
(Desa)		SD	SMP	SMA	Perguruan	
		- 7	1, 7,		Tinggi	
Blorok	1	2	1	1	1//	5
	2	2	PRIISTAN	2	0	5
	3	11	2	0	0	3
	4	1	4	:31 _	1	7
	5	3	2	2	2	9
	6	1	5	1	1	8
Brangsong	1	1	5	1	0	7
	2	5	2	0	0	7
	3	5	1	0	0	6
	4	5	1	0	1	7
	5	6	2	0	0	8
	6	0	6	0	0	6
	7	5	3	0	0	8
	8	4	0	0	1	5
KK		41	34	8	7	90
Persentase	(%)	45,56	37,38	8,89	7,78	100
a 1 b			(2010)			

Sumber:Data Primer yang Diolah (2010)

Berdasarkan data Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa keluarga miskin yang tamat SD sebanyak 45,56%, tamat SMP sebanyak 37,38%, tamat SMA 8,89 %, dan tamat perguruan tinggi sebanyak 7,78%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan kepala keluarga miskin adalah tamat SD.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan semakin rendah pendidikan seseorang, semakin kecil peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga sulit sekali untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga seharihari. Adapun gambar diagram menurut data diatas adalah sebagai berikut :



■SD ■SMP □SMA □PT

Sumber: Data Primer yang Diolah (2010)

#### 3. Pekerjaan tetap

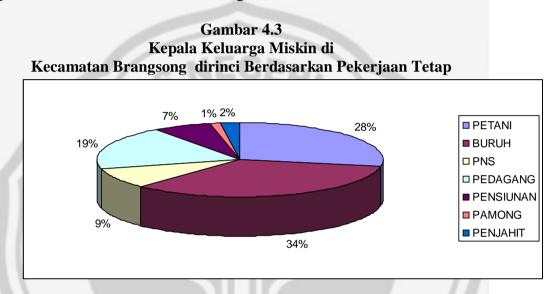
Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa pekerjaan tetap keluarga miskin di Kecamatan Brangsong sebagai berikut :

Tabel 4.3 Kepala Keluarga Miskin di Kecamatan Brangsong dirinci Berdasarkan Pekerjaan Tetap

Wilayah	RW				Pekerjaar	Tetap			Total
(Desa)		Petani	Buruh/	PNS	Pedagan	Pensiunan	Pamong	Penjahit	
			Karya		g		Desa		
			wan						
Blorok	1	1	2	1	1	1	0	0	5
	2	0	4	0	1	0	0	0	4
	3	1	1	0	0	0	1	0	3
	4	3	1	0	2	2	0	1	9
	5	1	3	2	1	0	0	0	7
	6	5	2	0	0	155	0	1	9
Brangson	1	2	3	0	0	0	0	0	5
g		1 2	7 //				6		
	2	0	6	0		0	0	0	6
	3	3	2	0	0	0	0	0	5
	4	3	2	0	1.//	0	0	0	6
	5	0	1	4	1	2	0	0	8
	6	3	3	0	0	0	0	0	6
	7	0	1	0	9	0	0	0	10
	8	3	1	1	0	0	0	0	5
KK	III	25	31	8	17	6	1	2	90
Persentase	(%)	27,78	34,44	8,89	18,89	6,67	1,1	2,22	100

Berdasarkan data Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa pekerjaan kepala keluarga miskin yang mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani sebanyak 27,78%, buruh/karyawan sebanyak 34,44%, PNS sebanyak 8,89 %, pedagang sebanyak 18,89 %, Pensiunan sebanyak 6,67%, Pamong Desa 1,1 %, dan Penjahit sebanyak 2,22%. Hal ini menunjukkan sebagian besar pekerjaan tetap keluarga miskin merupakan petani. Penghasilan petani bukan ditentukan dalam hitungan 1 bulan, namun dalam hitungan 4 bulan sekali ketika para petani dapat memanen hasil pertanian mereka, panen hanya dilakukan 3 kali dalam setahun. Hal ini membuat petani menderita karena harus menunggu penghasilan mereka selama 4

bulan sekali. Dengan penghasilan yang rendah tersebut, para petani tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga setiap bulan, sehingga ketika pendapatan tidak tidak cukup memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, yang bisa dilakukan hanya berhutang demi memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga. Adapun gambar diagram menurut data diatas adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Primer yang Diolah (2010)

#### 4. Penghuni Dalam Rumah

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan penghini dalam rumah di Kecamatan Brangsong sebagai berikut :

Tabel 4.4 Kepala Keluarga Miskin di Kecamatan Brangsong dirinci Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga

Wilayah	RW	Jui	mlah Tangg	ungan Kelu	rga	Total
(Desa)		2 orang	3 orang	4 orang	>4 orang	
Blorok	1	2	0	1	2	5
	2	4	1	0	2	7
	3	1	1	1	0	3
	4	1	2	1	2	6
	5	3	3	0	2	8
	6	2	1	2	2	7
Brangsong	1/	0	0	2	3	5
	2	0	1	2	4	7
	3	0	0	2	4	6
	4	0	1	1	5	7
11/4	5	0	1 1	3	4	8
11/11/11	6	0	1	5	0	6
	7	1	1	1 //	7	10
	8	1	0	2	2	5
KK	A	15	13	23	39	90
Persentase	(%)	16,67	14,44	25,56	43,33	100

Berdasarkan data Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa keluarga miskin yang mempunyai tanggungan sebanyak 2 orang sebesar 16,67%, 3 orang sebesar 14,44%, 4 orang sebesar oleh 25,56% dan lebih dari 4 orang sebesar 43,33%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tanggungan keluarga miskin adalah lebih dari 4 orang. Hal ini berpengaruh terhadap tingginya tingkat konsumsi keluarga dan rendahnya tabungan yang dimiliki oleh keluarga miskin. Hal ini dampak dari sebagian besar pendapatan kepala keluarga miskin yang hanya 0-500 ribu per bulan dan sebagian besar tidak mempunyai pekerjaan sampingan. Adapun gambar diagram menurut data diatas adalah sebagai berikut:

dirinci Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga

17%

43%

14%

2 ORANG

3 ORANG

4 ORANG

> 4 ORANG

Gambar 4.4 Kepala Keluarga Miskin di Kecamatan Brangsong dirinci Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga

# 5. Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan luas lantai bangunan tempat tinggal warga di Kecamatan Brangsong sebagai berikut :

Tabel 4.5 Kepala Keluarga Miskin di Kecamatan Brangsong dirinci Berdasarkan Luas Lantai Bangunan

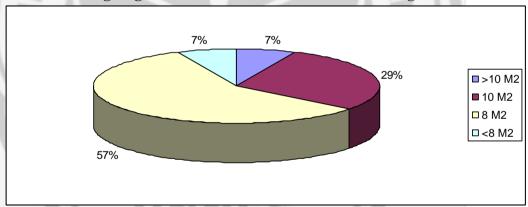
ixccamat	an Drang	song un inc	i Dei uasai	Kall Luas L	antai Dang	ullall
Wilayah	RW	В	iaya konsur	nsi Per Bula	ın	Total
(Desa)		>10 m2	10 m2	8 m2	< 8 m2	//
Blorok	1	0	0	5	0	5
	2	2	0	3	0	5
	3	0	USTAKA	AM 3	0	4
- 3	4	0	5	2	0	7
	5	0	1	6		8
	6	0	1	6	1	8
Brangsong	1	0	3	0	0	3
	2	0	1	6	0	7
	3	0	3	4	0	7
	4	0	0	7	0	7
	5	1	2	5	0	8
	6	0	3	3	0	6
	7	2	2	2	4	10
	8	1	4	0	0	5
KK		6	26	52	6	90
Persentas	e (%)	6,67	28,89	57,78	6,67	100

Sumber: Data Primer yang Diolah (2010)

Berdasarkan data Tabel 4.5, dapat diketahui bahwa keluarga miskin memiliki luas lantai bangunan > 10m2 ribu sebanyak 6,67 %, 10m2 sebanyak 28,89 %, 8m2 sebanyak 57,78 % dan < 8 2 sebanyak 6,67 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar luas lantai bangunan tempat tinggal masyarakat berukuran 8 m2. Hal ini mengindikasikan bahwa luas lantai masyarakat Kecamatan Brangsong akan dapat mempengaruhi masyarakat Kecamatan Brangsong karena luas lantai dapat memberikan cerminan bahwa masyarakat tersebut tergolong keluaraga miskin atau tidak.

Adapun gambar diagram menurut data diatas adalah sebagai berikut :

Gambar 4.5 Kepala Keluarga Miskin di Kecamatan Brangsong dirinci Berdasarkan Luas Lantai Bangunan



Sumber: Data Primer yang Diolah (2010)

#### 6. Jenis Lantai Bangunan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan jenis lantai bangunan keluarga miskin di Kecamatan Brangsong sebagai berikut :

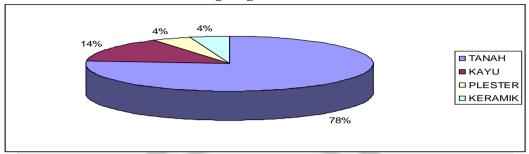
Tabel 4.6 Kepala Keluarga Miskin di Kecamatan Brangsong dirinci Berdasarkan usia

		Diangson	~		t thort	m 1
Wilayah	RW	_	Jumlah T	abungan		Total
(Desa)		Tanah	Kayu	Plester	Keramik	
Blorok	1	2	1	2	1	6
	2	4		0	0	5
	3	3	0	0	0	3
	4	5	1	0	1	7
	5	4	1	2	1	8
////	6	7	0	0	1	8
Brangsong	1	5	0	0	0	5
	2	5	2	0	0	7
100	3	5	0	0	0	5
11 2	4	5	2	0	0	7
11 6	5	5	3	0	0	8
	6	4	2	0	0	6
	7	10	0	0	0	10
11/1	8	5	0	0	0	5
KK		69	13	4	4	90
Persentase	e (%)	76,67	14,44	4,44	4,44	100

Berdasarkan data Tabel 4.6, dapat diketahui bahwa keluarga miskin memiliki jenis lantai bangunan tanah sebanyak 76,67 %, kayu sebanyak 14,44 %, plester sebanyak 4,44 % dan Keramik sebanyak 4,44 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jenis lantai bangunan tempat tinggal masyarakat adalah tanah. Jenis lantai yang dimiliki oleh masyarakat Kecamatan Brangsong sebagian besar adalah tanah, sehingga hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untui memilih masyarakat Kecamatan Brangsong sebagai obyek penelitian karena jensia lantai sebagian besar masyarakat adalah tanah.

Adapun gambar diagram menurut data diatas adalah sebagai berikut :

Gambar 4.6 Kepala Keluarga Miskin di Kecamatan Brangsong dirinci Berdasarkan usia



# 7. Dinding Tempat Tinggal

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan dinding tempat tinggal keluarga miskin di Kecamatan Brangsong sebagai berikut:

Kepala Keluarga Miskin di Kecamatan Brangsong dirinci Berdasarkan Dinding Tempat Tinggal

Tabel 4.7

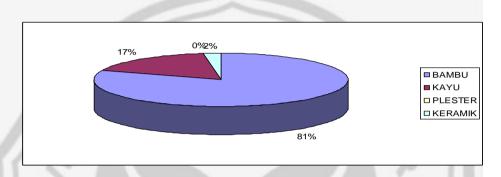
Recamatan Brangsong uninci berdasarkan binding rempat ringga									
Wilayah	RW		Dinding Tem	npat Tinggal	0.1	Total			
(Desa)		Bambu	Kayu	Plester	Keramik	7			
Blorok	1	4	1	0	0	5			
10.3	2	4	1	3	0	5			
- 11	3	3	1	0	0	4			
	4	3	3	0	1 //	7			
	5	6	2	0	0	8			
	6	7	1	0	0	8			
Brangsong	1	6	SIAKAA	0	0	7			
	2	7	0	0	0	7			
	3	5	2	0	0	7			
	4	6	1	0	0	7			
	5	5	0	0	1	6			
	6	6	0	0	0	6			
	7	6	2	0	0	8			
	8	4	1	0	0	5			
KK		72	15	0	2	90			
Persentase	2 (%)	80,00	16,67	0	2,22	100			

Sumber: Data Primer yang Diolah (2010)

Berdasarkan data Tabel 4.7, dapat diketahui bahwa keluarga miskin memiliki dinding tempat tinggal bambu sebanyak 80,00 %, kayu sebanyak 16,67

dan plester sebanyak 0,00 % dan keramik sebesar 2,22 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dinding bangunan tempat tinggal masyarakat terbuat dari bambu.. Adapun gambar diagram menurut data diatas adalah sebagai berikut :

Gambar 4.7 Kepala Keluarga Miskin di Kecamatan Brangsong dirinci Berdasarkan Dinding Tempat Tinggal



Sumber: Data Primer yang Diolah (2010)

### 8. Sumber Penerangan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan sumber penerangan keluarga miskin di Kecamatan Brangsong sebagai berikut :

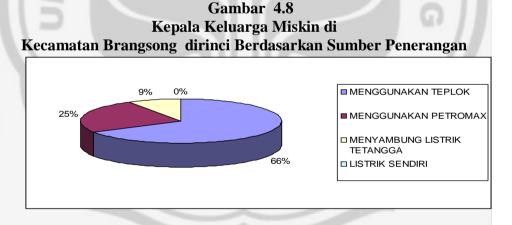
Tabel 4.8 Kepala Keluarga Miskin di Kecamatan Brangsong dirinci Berdasarkan Sumber Penerangan

Wilayah	RW	g g	Sumber Pener	angan	8.	Total
(Desa)	11/1	Menggunakan	Menggunakan	Menyambung	Listrik	
	100	teplok	Petromak	listrik	sendiri	
				tetangga		
Blorok	1	5	0	0	0	5
	2	4	0	1	0	5
	3	3	0	0	0	3
	4	4	1	3	0	8
	5	8	0	0	0	8
	6	2	6	0	0	8
Brangsong	1	6	1	0	0	7
	2	6	1	0	0	7
	3	2	4	0	0	6
	4	6	1	0	0	7

	5	7	1	0	0	8
	6	2	4	0	0	6
	7	3	3	0	0	6
	8	0	2	3	0	5
KK		59	24	8	0	90
Persentase (%)		66,67	24,73	8,6	0	100

Berdasarkan data Tabel 4.8, dapat diketahui bahwa keluarga miskin memiliki jenis penerangan teplok sebanyak 66,67 %, petromak sebanyak 24,73 %, listrik tetanggan sebanyak 8,6 % dan 0 sebanyak 0,00 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian lampu yang digunakan adalah teplok. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Brangsong menggunakan teplok untuk penerangan.

Adapun gambar diagram menurut data diatas adalah sebagai berikut :



Sumber: Data Primer yang Diolah (2010)

#### 9. Sumber Air yang digunakan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan sumber air yang digunakan keluarga miskin di Kecamatan Brangsong sebagai berikut :

 $G_{i}$ 

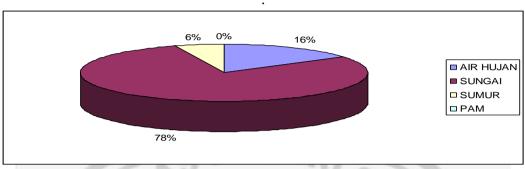
Tabel 4.9
Kepala Keluarga Miskin di
Kecamatan Brangsong dirinci Berdasarkan
Sumber Air yang digunakan

		Builiber 11	ii yang uig	Samanan		
Wilayah	RW		Sumb	er Air		Total
(Desa)		Air hujan	Sungai	Sumur	PAM	
Blorok	1	0	6	0	0	6
	2	0	5	0	0	5
	3	0	3	0	0	3
	4	1	6	0	0	7
	5	3	5	0	0	8
	6	0	8	0	0	8
Brangsong	1//	0	7	0	0	7
- 4	2	5	2	0	0	7
	3	0	7	0	0	7
	4	5	2	0	0	7
	5	0	0	4	0	4
11/1	6	0	6	0	0	6
	7	0	10	0	0	10
	8	0	4	1	0	5
KK	A	14	71	5	0	90
Persentas	Persentase (%)		78,89	5,56	0	100
a 1 D		D: 1 1 /0				

Sumber: Data Primer yang Diolah (2010)

Berdasarkan data Tabel 4.9, dapat diketahui bahwa keluarga miskin menggunakan sumber air hujan sebanyak 15,56 %, sungai sebanyak 78,89 %, Sumur sebanyak 5,56 % dan PAM sebanyak 0 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menggunakan sumber air sungai untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga miskin masih menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Penyebabnya adalah ketidakmampuan keluarga miskin dalam memasang instalasi PDAM dan membayar tagihan air setiap bulannya. Dengan menggunakan air sungai keluarga miskin dapat melakukan penghematan pengeluaran bulanan daripada harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar tagihan air PDAM. Adapun gambar diagram menurut data diatas adalah sebagai berikut

Gambar 4.9 Kepala Keluarga Miskin di Kecamatan Brangsong dirinci Berdasarkan Sumber Air yang digunakan



#### 10. Bahan Bakar

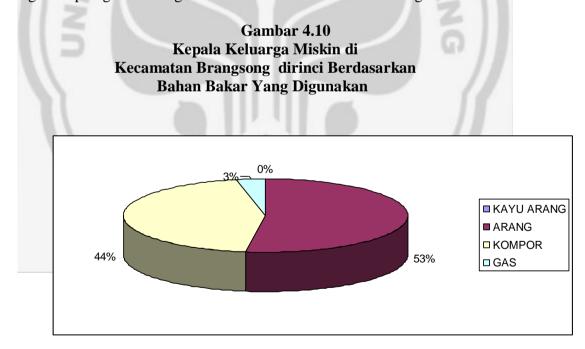
Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahan bakar yang digunakan keluarga miskin di Kecamatan Brangsong sebagai berikut :

Gambar 4.10 Kepala Keluarga Miskin di Kecamatan Brangsong dirinci Berdasarkan Bahan Bakar Yang Digunakan

Wilayah	RW		han Bakar y		kan	Total
(Desa)		Kayu	Arang	Kompor	Gas	
- 11		bakar	7.3			
Blorok	1	0	2	3	1	6
	2	0	3	2	0	5
	3	0		1	0	3
	4	0	2	5	0	7
	5	0	2	5	1	8
	6	0	5	2	1	8
Brangsong	1	0	0	4	0	4
	2	0	0	7	0	7
	3	0	6	0	0	6
	4	0	6	1	0	7
	5	0	4	4	0	8
	6	0	0	6	0	6
	7	0	10	0	0	10
	8	0	5	0	0	5
KK		0	47	40	3	90
Persentase	e (%)	0	52,22	44,44	3,33	100

Sumber: Data Primer yang Diolah (2010)

Berdasarkan data Tabel 4.10, dapat diketahui bahwa keluarga miskin yang menggunakan kayu bakar sebanyak 0,00 %, arang sebesar 52,22 %, kompor sebanyak 44,44%, dan gas 3,33 %. Hal ini menunjukkan sebagian besar keluarga miskin menggunakan arang sebagai bahan bakar untuk memasak setiap hari (52,22%). arang dipilih karena murah dibandingkan jika menggunakan minyak tanah maupun gas. Minyak tanah sekarang sulit dicari dan berharga mahal karena pemerintah membatasi pasokan minyak tanah untuk mendukung program konversi minyak tanah ke gas elpiji. Dengan menggunakan arang, maka keluarga miskin dapat berhemat, apalagi pendapatan keluarga juga relatif sedikit dan tidak mempunyai dana untuk menggunakan bahan bakar lain selain menggunakan arang. Adapun gambar diagram menurut data diatas adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Primer yang Diolah (2010)

#### 11. Mengkonsumsi Daging

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan keluarga miskin mengkonsumsi daging di Kecamatan Brangsong sebagai berikut :

Tabel 4.11
Kepala Keluarga Miskin di
Kecamatan Brangsong dirinci Berdasarkan Warga yang
Mengkonsumsi Daging

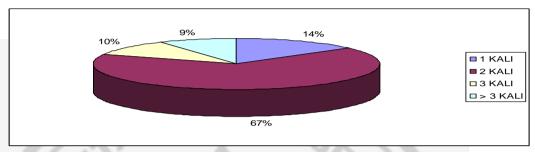
Wilayah (Desa)	RW		Mengkons	umsi Daging		Total
		1 kali	2 kali	3 kali	> 3 kali	
Blorok	1	0	5	1	0	6
	2	0	5	0	0	5
	3	0	3	0	0	3
///	4	0	2	0	5	7
9/ 4	5	0	5	3	0	8
	6	1	3	3	1	8
Brangsong	1	0	5	0	0	5
112	2	0	7	0	0	7
	3	0	3	0	2	5
110	4	0	6	1	0	7
	5	8	0	0	0	8
	6	0	6	0	0	6
2	7	0	9	1	0	10
11.	8	4	1	0	0	5
KK		13	60	9	8	90
Persentase (	(%)	14,44	66,67	10,00	8,88	100

Sumber:Data Primer yang Diolah (2010)

Berdasarkan data Tabel 4.11, dapat diketahui bahwa keluarga miskin yang mampu mengkonsunsumsi daging 1 kali sebanyak 14,44%, 2 kali sebanyak 66,67%, 3 kali sebanyak 10,00% dan > 3 kali sebanyak 8,88%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga miskin mampu mengkonsumsi daging 2 kali (66,67%). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Brangsong makan daging 2 kali sehingga masyarakat termasuk tergolong miskin.

Adapun gambar diagram menurut data diatas adalah sebagai berikut :

Gambar 4.11 Kepala Keluarga Miskin di Kecamatan Brangsong dirinci Berdasarkan Warga yang Mengkonsumsi Daging



Sumber: Data Primer yang Diolah (2010)

#### 12. Pembelian Pakaian

Berdasarkan hasil penelitian dapat kemampuan membeli pakaian oleh keluarga miskin di Kecamatan Brangsong sebagai berikut :

Tabel 4.12 Kepala Keluarga Miskin di Kecamatan Brangsong dirinci Berdasarkan Kemampuan Membeli Pakaian

Wilayah	RW	Ken	nampuan Mo	embeli maka	anan	Total
(Desa)		1 kali	2 kali	3 kali	> 3 kali	1
Blorok	1	2	0	1	3	6
	2	BEDDII	0	0	4	5
	3	2	0	0	1	3
	4	6	0	0	1	7
	5	4	0	0	4	8
	6	3	4	0	1	8
Brangsong	1	4	0	1	2	7
	2	7	0	0	0	7
	3	3	0	0	4	7
	4	3	0	0	2	5
	5	0	8	0	0	8
	6	3	0	0	3	6
	7	2	1	0	5	8
	8	1	4	0	0	5
KK		41	17	2	30	93
Persentase	(%)	45,56	18,89	2,22	33,33	100

Sumber:Data Primer yang Diolah (2010)

Berdasarkan data Tabel 4.12, keluarga miskin yang mampu membeli pakaian sebesar 1 kali sebanyak 45,56 %, 2 kali sebanyak 18,89 %, 3 kali sebanyak 2,22 % dan > 3 kali sebanyak 33,33 %. Hal ini dapat diartikan bahwa warga masyarakat mampu membeli pakaian 1 kali dalam 1 tahun sebanyak 45,56 %. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagai responden berpendapat bahwa dalam satu bulan membeli pakaian 1 kali. Menurut sebagian orang pakaian merupakan kebutuhan primer tetapi mereka hanya dapat membeli pakaian, dalam 1 bulan 1 kali. Sehingga menurut peneliti, mengelompokkan responden ini dalam kategori miskin karena hanya dapat membeli pakaian, dalam 1 bulan 1 kali yaitu sebesar 45,56 %. Sedangkan sisanya yaitu 54,45 membeli pakaian, > dari dua kali.

Adapun gambar diagram menurut data diatas adalah sebagai berikut :



#### 13. Tempat Berobat Jika Sakit

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan tempat berobat jika warga masyarakat sakit di Kecamatan Brangsong sebagai berikut :

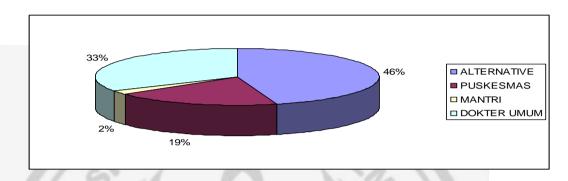
Tabel 4.13 Kepala Keluarga Miskin di Kecamatan Brangsong dirinci Berdasarkan Tempat Berobat Jika Sakit

Wilayah	RW		empat beroba		0.000 0.1100	Total
(Desa)		Alternative	Puskesmas	Mantri	Dokter	
					Umum	
Blorok	1	2	0	1	3	6
	2	1	0	0	4	5
	3	2	0	0	1	3
	4	6	0	0	1	7
	5	4	0	0	4	8
	6	3	4	0	1	8
Brangsong	1/	4	0	1	2	7
	2	7	0	0	0	7
	3	3	0	0	4	7
///	4	3	0	0	2	5
///	5	0	8	0	0	8
11/11	6	3	0	0	3	6
	7	2	1	0	5	8
	8	1	4	0	0	5
KK	A	41	17	2	30	93
Persentase	(%)	45,56	18,89	2,22	33,33	100

Berdasarkan data Tabel 4.13, dapat diketahui bahwa tempat berobat warga miskin adalah alternative sebanyak 45,56 %, puskesmas sebanyak 18,89 %, mantri sebanyak 2,22 % dan dokter umum sebanyak33,33 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar warga miskin berobat ke alternative adalah (45,56 %). Hal ini mengindikasikan bahwa warga miskin jika berobat ke alternative, alternative disini dapat diartikan bahwa jika berobat ke dukun. Karena masyarakat Kecamatan Brangsong merupakan masyarakat yang masih percaya dengan obat-obatan dari rempah-rempah (jamu). Tradisi yang dilakukan penduduk ini adalah berobat pada "orang pintar" sehingga mereka cenderung lebih mempercayai obat tradisional yang terbuat dari rempah-rempah dibandingkan dengan obat-obatan kimia.

Adapun gambar diagram menurut data diatas adalah sebagai berikut :

Gambar 4.13 Kepala Keluarga Miskin di Kecamatan Brangsong dirinci Berdasarkan Tempat Berobat Jika Sakit



Sumber: Data Primer yang Diolah (2010)

# 14. Jumlah Penghasilan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bahwa penghasilan kepala keluarga miskin dari pekerjaan tetap sebagai berikut :

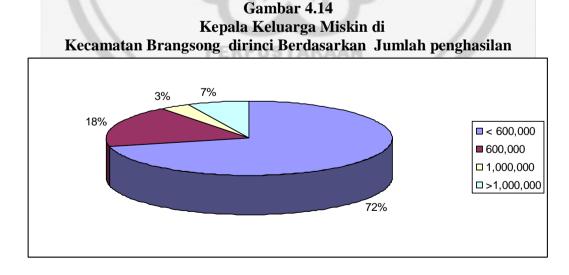
Tabel 4.14
Kepala Keluarga Miskin di
Kecamatan Brangsong dirinci Berdasarkan Jumlah penghasilan

Wilayah	RW		Jumlah j	penghasilan	- pongawan	Total
(Desa)		<	600.000	1.000.000	>1.000.000	
		600.000	4	1	/ //	
Blorok	1	0	2	0	2	4
	2	4	USTAKA	AN 0	0	5
1	3	11	2	0	0	3
	4	7	0	0	0	7
	5	4		0	3	8
	6	7	0	0	1	8
Brangsong	1	3	3	0	0	6
	2	5	0	3	0	8
	3	6	0	0	0	6
	4	4	3	0	0	7
	5	6	1	0	0	7
	6	2	4	0	0	6
_	7	9	1	0	0	10
	8	5	0	0	0	5
KK		63	18	3	6	90
Persentase (%)		70,00	20,00	3,33	6,67	100

Sumber: Data Primer yang Diolah (2010)

Berdasarkan data Tabel 4.14, dapat diketahui jumlah pendapatan kepala keluarga miskin dari pekerjaan tetap antara <600.000 sebanyak 63 orang (70,00%), 600.000 sebanyak 18 orang (20,00 %), 1000.000 sebanyak 3 orang (3,33 %), lebih dari 1 juta sebanyak 6 orang (6,67 %). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan keluarga miskin dari pekerjaan tetap sebesar 0-500 ribu. Hal ini merupakan pengaruh dari rendahnya tingkat pendidikan yang sebagian besar hanya tamat SD

Pendapatan yang diterima sebagian besar warga miskin yang hanya 600.000 jelas sangat memberatkan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga, ditambah dengan beban keluarga yang besar. Sehingga untuk menambah pendapatan keluarga, setiap kepala keluarga seharusnya mempunyai pekerjaan sampingan yang dapat menopang kebutuhan konsumsi keluarga selain pendapatan dari pekerjaan tetap. Adapun gambar diagram menurut data diatas adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Primer yang Diolah (2010)

#### 15. Perabotan Rumah Tangga

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan perabotan rumah tangga yang digunakan keluarga miskin di Kecamatan Brangsong sebagai berikut :

Tabel 4.15
Kepala Keluarga Miskin di
Kecamatan Brangsong dirinci Berdasarkan
Parabatan mumah tangga yang digunakan

	Pera	botan ruma	h tangga ya	ang diguna	kan	
Wilayah	RW	Perabota	n rumah tan	igga yang di	gunakan	Total
(Desa)	1	Meja	Meja,	Meja,	Meja dan	
	11	kursi	kursi,	kursi	kursi	
		tamu	tamu,	tamu	tamu	
		almari	tempat	almari	11	
	C.	tempat	tidur	\ 5		
	2	tidur dan	1 1		9	
/// 13	F 1	meja			7	
		kursi			120	711
7		makan	4			
Blorok	1	2	0	1	2	5
11 2	2	4	1	0	2	7
	3	1	1	1	0	3
	4	1	2	1	2	6
1/1	5	3	3	0	2	8
	6	2	1	2	2	7
Brangsong	1	0	0	2	3	5
11/	2	0	1	2	4	7
	3	0	0	2	4	6
	4	0	1	1	5	7
11.	5	0	USTAKA	3	4	8
1	6	0		5	0	6
	7	7	1	1	7	10
	8	1	0	2	2	5
KK		15	13	23	39	90
Persentase	(%)	16,67	14,44	25,56	43,33	100

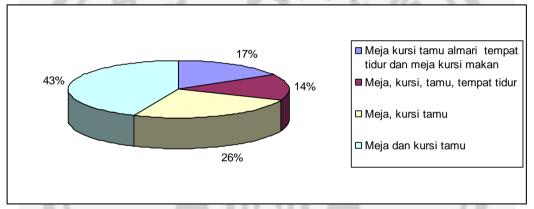
Sumber: Data Primer yang Diolah (2010)

Berdasarkan data Tabel 4.15, dapat diketahui bahwa keluarga miskin memiliki perabotan Meja kursi tamu almari tempat tidur dan meja kursi makan sebanyak 2 orang sebesar 16,67%, Meja kursi tamu, tempat tidur sebesar 14,44 %, Meja kursi tamu, almari, tempat tidur sebesar oleh 25,56% Meja dan kursi tamu

sebesar 43,33%. Hal ini berarti bahwa sebagian besar memiliki perabotan meja dan kusi tamu sebesar 25,56 %. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat Kecamatan Brangsong Kendal hanya memiliki meja dan kursi saja. Karena sebagaian besar masyarakat memiliki tempat tinggal yang kurang layak sehingga mereka hanya menempatkan meja dan kursi tamu saja.

Adapun gambar diagram menurut data diatas adalah sebagai berikut :

Gambar 4.15 Kepala Keluarga Miskin di Kecamatan Brangsong dirinci Berdasarkan Perabotan rumah tangga yang digunakan



Sumber: Data Primer yang Diolah (2010)

# 4.1.3 Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

# 4.1.3.1 Pelaksanaan Kegiatan Lingkungan (Fisik)

#### 1. Deskripsi Program

Masalah kemiskinan yang dialami oleh warga masyarakat Kecamatan Brangsong Kendal pada dasarnya telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah setempat. Dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan di perkotaan terutama di Kecamatan Brangsong Kendal, pemerintah memberikan

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan mulai tahun 1999. sebagai pelaksana pengelolaan P2KP adala Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kecamatan Brangsong Kendal.

BKM merupakan forum musyawarah dan pengambilan keputusan tertinggi warga masyarakat setempat, yang berhak menilai rencana/usulan kegiatan yang tercakup dalam jenis kegiatan P2KP. Melalui BKM ini dana bantuan P2KP disalurkan kapada masyarakat. BKM ini berperan dalam menilai dan memberikan persetujuan seRWa mengkoordinasikan rencana – rencana kegiatan KSM.

Pelaksanaan kegiatan lingkungan (fisik) dilakukan dengan mengadakan program pavingisasi dan rabat beton jalan desa. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun jalan desa baru dan memperbaiki jalan desa yang mengalami kerusakan. Pavingisasi dilakukan untuk gang-gang desa yang sempit, sedangkan rabat beton (betonisasi) dilakukan untuk jalan desa yang lebar. Program tersebut dilakukan disebabkan kondisi jalan yang ada di kedua desa mengalami kerusakan sehingga arus transportasi tidak lancar yang berimbas pada lesunya kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan perbaikan untuk mengatasi masalah tersebut.

#### 2. Sasaran program yang telah tercapai

Pelaksanaan program pavingisasi dan rabat beton di Desa Blorok berjalan dengan sukses dan lancar, dari 41 RW yang direncanakan semuanya mendapatkan bantuan dana, pelaksanaan program tersebut merata di setiap RW yang ada di Desa Linggapura. Penyaluran dana pun dibagi rata untuk setiap RW disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing RW ditambah dengan swadaya masyarakat dalam bentuk bantuan berupa semen, pasir dan juga bantuan dalam bentuk tenaga.

Pelaksanaan program pavingisasi di Desa Brangsong juga berjalan dengan sukses dan lancar, namun dari 8 RW yang semula direncanakan, baru 6 RW yang telah mendapatkan bantuan dana, sisanya akan diberikan bantuan dari dana tahap 1 APBN yang belum terealisasi. Baru RW 1, 3, 4, 5, 6 dan 7 yang telah mendapatkan bantuan, sedangkan RW 2 dan 8 yang belum mendapatkan bantuan dana.

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program tersebut bervariasi, ada yang bisa satu bulan, satu minggu, bahkan satu malam. Hal ini tergantung dari panjang atau pendeknya jarak yang jalan yang dibangun dan banyak atau sedikitnya masyarakat yang berpartisipasi dalam menyelesaikan program tersebut. Dengan relatif cepatnya program pavingisasi dan rabat beton tersebut sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat miskin dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari.

#### 3. Gambaran Umum Implementasi P2KP

Implementasi P2KP tahun 2007 di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dilaksanakan di dua desa yaitu Desa Blorok dan Desa Brangsong. Implementasi P2KP tahun 2007 merupakan proyek dari pemerintah yang pertama kali dilaksanakan di Kecamatan Brangsong, demikian juga untuk seluruh Kabupaten Kendal. Pada tingkat kecamatan, pelaksanaan program dilakukan oleh PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kecamatan) yang bertugas untuk emonitoring pelaksanaan P2KP di tingkat desa, sedangkan pada tingkat desa pelaksanaan program dilakukan oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). BKM di Desa Blorok adalah BKM Muchlisin dan di Desa Brangsong BKM Sumber Redjeki. Masing-masing BKM mempunyai KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang bertugas melaksanakan program P2KP di tingkat RW.

Kepengurusan BKM dan KSM bersifat sukarela, sehingga tidak ada paksaan untuk menjadi relawan dalam pelaksanaan program P2KP.

#### 4. Sasaran Program P2KP

Sasaran utama implementasi program P2KP di Kecamatan Brangsong adalah warga miskin yang tersebar di Desa Blorok dan Desa Brangsong. Setiap warga miskin yang terdapat di masing-masing desa tergabung dalam KSM. Untuk Desa Blorok terdapat 11 KSM yang membawahi 6 RW, sedangkan Desa Brangsong terdapat 8 KSM yang membawahi 8 RW. KSM-KSM tersebut dalam melaksanakan tugas dibawah koordinasi BKM pada masing-masing desa, BKM Sumber Redjeki pada Desa Brangsong dan BKM Mukhlisin pada Desa Blorok.

#### 4.1.3.2 Tahapan Pelaksanaan Program P2KP

#### 1. Jenis dan Proporsi Program P2KP

Pelaksanaan program P2KP di Kecamatan Brangsong menitikberatkan pada kegiatan lingkungan, kegiatan Ekonomi, dan kegiatan Sosial. Dibawah ini merupakan jenis dan proporsi masing-masing desa:

Tabel 19
Jenis dan Proporsi Program P2KP Masing-masing Desa

Desa	Jenis Kegiatan	Proporsi
Blorok	- Kegiatan Lingkungan (Pavingisasi	70 %
	Jalan dan Rabat Beton)	
	-Kegiatan Ekonomi (Pinjaman	18 %
	Modal Bergulir)	
	-Kegiatan Sosial (poliklinik desa)	9 %
	-BOP (Dana Operasional BKM)	3 %
Brangsong	- Kegiatan Lingkungan (Pavingisasi	80 %
	Jalan)	
	- Kegiatan Ekonomi (Pinjaman	8 %
// / 5	Modal Bergulir)	
1/6	- Kegiatan Sosial (poliklinik Desa)	7 %
11/2/14	-BOP (Dana Operasional BKM)	5 %

Sumber: Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan BLM BKM (2007)

Tabel 19 menunjukkan bahwa sebagian besar proporsi P2KP di Kecamatan Brangsong dititikberatkan pada kegiatan lingkungan yaitu program pavingisasi jalan dan rabat beton dengan alokasi 70 % untuk desa Blorok dan 80 % untuk desa Brangsong. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi seperti pinjaman modal bergulir sangat minim yaitu 18 % untuk desa Blorok dan 8 % untuk desa Brangsong . Hal ini dikarenakan, kondisi jalan kampong di dua desa sangat parah, bahkan belum ada yang mendapatkan akses jalan, sehingga Implementasi P2KP yang pertama kalinya dilaksanakan di Kecamatan Brangsong menitikberatkan pada bidang fisik.

#### 2. Jumlah Dana yang dialokasikan

Dana Implementasi P2KP Kecamatan Brangsong merupakan dana bantuan yang bersumber dari APBN Pemerintah Pusat dan APBD Kabupaten Kendal. Selain dana dari APBN dan APBD, juga terdapat dana swadaya masyarakat Kecamatan Brangsong. Untuk lebih jelas dalam proporsi jumlah dana yang dialokasikan dapat dilihat dalam Tabel 21 sebagai beriku

Tabel 21 menunjukkan bahwa total dana yang dialokasikan dari APBN dan APBD sebanyak Rp 250.000.000, sedangkan untuk dana swadaya sebesar Rp 75.000.000 sehingga total dana yang dialokasikan untuk implementasi P2KP sebesar Rp 325.000.000. Brangsong mendapatkan dana yang lebih banyak, hal ini disebabkan jumlah orang miskin lebih banyak daripada desa Blorok, warga miskin Brongsong mencapai 170 KK, sedangkan warga miskin Brangsong hanya 1.082 KK.

#### 3. Tahapan Penyaluran Dana

Penyaluran dana P2KP di Kecamatan Brangsong dilaksanakan dalam 3 tahap. Untuk lebih rinci nmengenai tahapan penyaluran dana P2KP dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 20
Tahapan Penyaluran Dana P2KP Kecamatan Brangsong

Desa	Tahapan	Sumber Dana	Total Dana
	Pembayaran		
Blorok	Tahap 1	APBN	17.500.000
	Tahap 1+2+3	APBD	87.500.000
	Tahap 2	APBN	43.750.000
	Tahap 3	APBN	26.250.000
Brangsong	Tahap 1	APBN	7.500.000
	Tahap 1+2+3	APBD	37.500.000
	Tahap 2	APBN	18.750.000
	Tahap 3	APBN	11.250.000

Sumber: Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan BLM BKM (2007)

Tabel 20 menunjukkan bahwa masing-masing tahap memiliki dana yang berbeda-beda dan sumber dana mana yang digunakan. Dapat dilihat bahwa penyaluran dana P2KP dari dana APBN dibagi dalam 3 tahap, sama halnya dengan penyaluran dana dari APBD, namun dana dari APBD langsung dibayarkan dan mencakup 3 tahap, sehingga proses penyaluran dana dapat lebih cepat terealisasikan.

#### 4. Realisasi Penyaluran Dana

Penyaluran dana tersebut yang rencananya dibayarkan dalam 3 tahap (lihat tabel 22), hanya baru terealisasi 1 tahap yaitu tahap 2. Sesuai dengan surat perjanjian penyaluran bantuan BLM BKM antara PJOK dan BKM disebutkan bahwa penyaluran dana tahap 1 sebesar Rp 17.500.000 dari pos APBN belum cair, sehingga langsung disalurkan dana tahap 2 sebesar Rp 87.500.000 dari pos APBD Kabupaten Kendal.

Dana tahap 2 yang sudah terealisasi dari APBD Kabupaten Kendal digunakan untuk melaksanakan program kegiatan lingkungan (fisik) yang antara lain melaksanakan pavingisasi dan rabat beton (Betonisasi) jalan desa. Hal ini sesuai dengan yang teRWera dalam surat perjanjian bantuan BLM BKM bahwa sebagian besar dana digunakan untuk melaksanakan kegiatan lingkungan fisik, untuk Desa Blorok sebanyak 70 %, sedangkan Desa Brangsong sebanyak 80 %.

#### 4.1.4 Penggunaan Dana Bergulir

Program dana bergulir adalah bantuan perkuatan pemerintah dalam bentuk uang atau barang modal yang disalurkan kepada Koperasi, Usaha Kecil Menengah (KUMK). Dana tersebut disalurkan melalui pola bergulir . Pola bergulir adalah cara memanfaatkan bantuan kepada KUMK. Tata cara atau persyaratannya diatur dalam keputusan Menteri KUKM. Pola perguliran ini di mulai tahun 2000 dan merupakan salah satu terobosan Kementerian KUKM untuk membantu KUKM dalam rangka menstimulir pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kebijakan pembinaan dan pengembangan program KUKM.

1. Proyek pengasapalan jalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan proyek pengaspalan keluarga miskin di Kecamatan Brangsong sebagai berikut :

Tabel 4.16 Proyek pengasapalan jalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini

Wilayah	RW	Proyek	pengasapalan	jalan sesuai d	engan	Total
(Desa)		ke	kebutuhan masyarakat saat ini			
		Sangat	Cukup	Kurang	Tidak	
		Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
Blorok	_1	4	EGF	0	0	5
	2	4	1	3	0	5
	3	3	<u></u> 1	0	0	4
	4	3	3	0	1	7
	5	6	2	0	0	8
11/11	6	7	1	0	0	8
Brangsong	1	6	1	0	0	7
	2	7	0	0	0	7
	3	5	2	0	0	7
	4	6	1	0	0	7
)	5	5	0	0	1	6
11 -	6	6	0	0	0	6
11 1	7	6	2	0	0	8
103	8	4	1	0	0	5
KK		72	15	0	2	90
Persentase	e (%)	80,00	16,67	0	2,22	100

Sumber: Data Primer yang Diolah (2010)

Berdasarkan data Tabel 4.16, dapat diketahui bahwa sebanyak 80,00 %, menuyatakan sangat sesuai dengan adanya proyek pengaspalan sebanyak 16,67 dan cukup sesuai sebanyak 16,67 %, kurang sesuai sebanyak 0,00 % dan tidak sesuai sebesar 2,22 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar warga menyarakan bahwa proyek pengaspalan sangat sesuai dengan kebutuhan masayarakat saat ini.

 Proyek pengaspalan jalan yang dilaksanakan dalam program P2KP efektif dalam meningkatkan akses jalan sehingga berdampak pada kemajuan perdagangan

Tabel 4.17 Proyek pengaspalan jalan

1 Toyek pengaspalan jalan								
Wilayah	RW	F	Proyek peng	aspalan jala	n	Total		
(Desa)		Sangat	Cukup	Kurang	Tidak			
		efektif	efektif	efektif	efektif			
Blorok	1	0	2	3	1	6		
	2	0	3	2	0	5		
	3	0	2	1	0	3		
	4	0	2	5	0	7		
	5	0	2	5	1	8		
	6	0	5	2	1	8		
Brangsong	1	0	0	4	0	4		
	2	0	0	7	0	7		
	3	0	6	0	0	6		
	4	0	6	1	0	7		
/// 17	5	0	4	4	0	8		
	6	0	0	6	0	6		
	7	0	10	0	0	10		
	8	0	5	0	0	5		
KK	AV	0	47	40	3	90		
Persentase	e (%)	0	52,22	44,44	3,33	100		

Berdasarkan data Tabel 4.17, dapat diketahui bahwa Proyek pengaspalan jalan yang dilaksanakan dalam program P2KP efektif dalam meningkatkan akses jalan sehingga berdampak pada kemajuan sebanyak 0,00 % menyatakan sangat efektif, sebesar 52,22 % menyatakan cukup efektif, kurang efektif sebanyak 44,44%, dan tidak efektif 3,33 %. Proyek pengaspalan jalan yang dilaksanakan dalam program P2KP efektif dalam meningkatkan akses jalan sehingga berdampak pada kemajuan perdagangan selama ini kurang efektif, hal ini karena proyek pengaspalan belum merata dari setiap desa.

3. Setelah adanya proyek perbaikan rumah yang dilaksanakan P2KP kondisi perumahan masyarakat di sekitar menjadi layak huni.

Tabel 4.18 Kondisi perumahan masyarakat di sekitar menjadi layak huni

Wilayah	RW	RW Kondisi Perumahan Masyarakat Di Sekitar						
(Desa)	17. 77	Kondist I	Menjadi L		1 SCRITAI	Total		
(Desa)		G .			m: 1 1			
		Sangat	Cukup	Kurang	Tidak			
		layak	layak	layak	layak			
Blorok	1	5	0	0	0	5		
	2	4	0	1	0	5		
	3	3	0	0	0	3		
- 4	4	4		3	0	8		
	5	8	0	0	0	8		
	6	2	6	0	0	8		
Brangsong	1 /	6	1	0	0	7		
/// 3	2	6	1	0	0	7		
81 4	3	2	4	0	0	6		
7	4	6	1	0	0	7		
	5	7	1	0	0	8		
112	6	2	4	0	0	6		
	7	3	3	0	0	6		
	8	0	2	3	0	5		
KK	KK		24	8	0	90		
Persentase	2 (%)	66,67	24,73	8,6	0	100		

Sumber: Data Primer yang Diolah (2010)

Berdasarkan data Tabel 4.18, dapat diketahui bahwa Setelah adanya proyek perbaikan rumah yang dilaksanakan P2KP kondisi perumahan masyarakat di sekitar menjadi layak huni ebanyak 66,67 %, petromak sebanyak 24,73 %, listrik tetanggan sebanyak 8,6 % dan 0 sebanyak 0,00 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar warga menyatakan bahwa dengan adanya proyek perbaikan rumah yang dilaksanakan P2KP kondisi perumahan masyarakat di sekitar menjadi layak huni.

#### 4. Pelaksanaan program P2KP secara keseluruhan

Tabel 4.19 Pelaksanaan program P2KP secara keseluruhan

i ciaksanaan pi ogi am i 21xi secara kesetui uhan								
Wilayah	RW	Pelak	Pelaksanaan program P2KP secara					
(Desa)			keselu	ıruhan				
		Sangat	Cukup	Kurang	Tidak			
		layak	layak	layak	layak			
Blorok	1	0	2	3	1	6		
	2	0	3	2	0	5		
	3	0	2	1	0	3		
	4	0	2	5	0	7		
	5	0	2	5	1	8		
	6	0	5	2	1	8		
Brangsong	1	0	0	4	0	4		
	2	0	0	7	0	7		
////	3	0	6	0	0	6		
11/1/	4	0	6	1	0	7		
	5	0	4	4	0	8		
1	6	0	0	6	0	6		
	7	0	10	0	0	10		
	8	0	5	0	0	5		
KK		0	47	40	3	90		
Persentase	2 (%)	0	52,22	44,44	3,33	100		

Sumber: Data Primer yang Diolah (2010)

Berdasarkan data Tabel 4.19, dapat diketahui bahwa sebanyak 0,00 % menyatakan sangat layak, cukup layak sebesar 52,22 %, kurang layak sebanyak 44,44%, dan tidak layak 3,33 %. Hal ini menunjukkan sebagian besar menyatakan bahwa pelaksanaan proyek pengaspalan layak dalam pelaksanaannya. Layak dalam hal ini adalah bahwa pelaksanaan P2KP yang dilaksanakan pemerintah dapat memberikan harapan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memiliki kondisi lingkungan dan perumahan yang memadai.

#### 5. Partisipasi masyarakat dalam membantu program-program P2KP

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan partisipasi masyarakat keluarga miskin di Kecamatan Brangsong sebagai berikut :

Tabel 4.20 Partisipasi masyarakat

1 ar tisipasi masyar akat								
Wilayah	RW		Partisipasi masyarakat			Total		
(Desa)		Sangat	Cukup	Kurang	Tidak			
		aktif	aktif	aktif	aktif			
Blorok	1	4	1	0	0	5		
	2	4	1	3	0	5		
	3	3	1	0	0	4		
	4	3	3	0	1	7		
	5	6	2	0	0	8		
	6	7	1	0	0	8		
Brangsong	1	6	1	0	0	7		
	2	7	0	0	0	7		
4	3	5	2	0	0	7		
	4	6	1	0	0	7		
	5	5	0	0	1	6		
///	6	6	0	0	0	6		
11/11	7	6	2	0	0	8		
	8	4	1	0	0	5		
KK	1/4	72	15	0	2	90		
Persentase	2 (%)	80,00	16,67	0	2,22	100		

Berdasarkan data Tabel 4.20, dapat diketahui bahwa warga masyarakat menyatakan sangat aktif sebanyak 80,00 %, cukup aktif sebanyak 16,67 dan kurang aktif sebanyak 0,00 % dan tidak aktif sebesar 2,22 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat aktif dalam membantu program P2KP.

# 6. Bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu program-program P2KP

Berdasarkan hasil penelitian dapat diterangkan bentuk partisipasi masyarakat keluarga miskin di Kecamatan Brangsong sebagai berikut :

**Tabel 4.21**Bentuk partisipasi masyarakat

Wilayah	Wilayah RW Bentuk partisipasi masyarakat					
(Desa)		Partisipasi dalam	Partisipasi dalam	Partisipasi dalam	Partisipasi dalam	
		pengambilan	pengambilan	pengambilan	evaluasi	
		keputusan,	keputusan,	keputusan,	program	
		implementasi,	implementasi,	implementasi,		
		pemanfaatan	pemanfaatan			
		dan evaluasi				
		program				
Blorok	1	2	0	1	3	6
	2	1.	0	0	4	5
	3	2	0	0	1	3
	4	6	0	0	1	7
	5	4	0	0	4	8
	6	3	4	0	1	8
Brangsong	1	4	0	1	2	7
	2	7	0	0	0	7
	3	3	0	0	4	7
	4	3	0	0	2	5
	5	0	8	0	0	8
	6	3	0	0	3	6
11 -	7	2	1	0	5	8
	8	1	4	0	0	5
KK		41	17	2	30	93
Persentase	(%)	45,56	18,89	2,22	33,33	100

Berdasarkan data Tabel 4.21, yang menyatakan bahwa Partisipasi dalam pengambilan keputusan, implementasi, pemanfaatan dan evaluasi program sebesar 45,56 %, Partisipasi dalam pengambilan keputusan, implementasi, pemanfaatan sebanyak 18,89 %, Partisipasi dalam pengambilan keputusan, implementasi, sebanyak 2,22 % dan Partisipasi evaluasi program sebanyak 33,33 %. Hal ini dapat diartikan bahwa warga masyarakat sebagian besar menyatakan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, implementasi, pemanfaatan dan evaluasi program sebanyak 45,56 %. Partisipasi dalam pengambilan keputusan,

implementasi, pemanfaatan dan evaluasi program sebagai contoh partisipasi ini dimiliki oleh pengurus utama yang terlibat langsung dalam pelaksanaan P2KP, sedangkan bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan, implementasi, pemanfaatan adalah pengurus RT, RW yang mengangani langsung pelaksanaan program P2KP, bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan, implementasi meliputi panitia yang ditunjuk dalam menangai pelaksanan P2KP menurut daerah atau Desa dan Partisipasi dalam evaluasi program adalah penduduk sekitar yang menerima program P2KP.

# 4.1.5 Pengembalian Dana Bergulir

Adapun pembayaran angsuran di kedua Desa Blorok adalah sebagai berikut :

Tabel 4.22 Pembayaran angsuran di kedua Desa Blorok

No	KSM	Pokok	Jasa	Jumlah						
Mare	Maret – Desember 2008									
1.	AT Taqwa	2.263.750	871.200	3.134.950						
2.	Semox	8.351.162	2.504.838	10.856.000						
3.	Tresno	1.976.400	237.600	2.214.000						
4.	Barokah	2.773.800	333.000	3.106.800						
Janua	ri 2009 –Maret 2010	PERPUST/	KAAN							
6	Maju Makmur	3.738.000	672.000	4.110.000						
7.	Sembung Raya	3.900.000	708.000	4.608.000						
8.	Morodadi	1.287.000	231.000	6.126.000						
9.	Melati	5.421.000	650.000	12.197.000						
10.	Rindu	7.564.000	910.000	8.474.000						
11	Sembung jaya	7.720.000	880.000	8.600.000						
12	Mekar sari	8.531.000	1.080.000	9.611.000						
13	Cahaya	5.967.000	770.000	6.737.000						
Deser	Desember 2009 –Maret 2010									
14	Sukses	2.779.920	379.080	3.159.000						

Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pembayaran angsuran setiap KSM di Desa Blorok. Dengan pinjaman pokok dan jasa yang bervariasi pada setiap bulan tingkat pengembalian angsuran di Desa Blorok cukup lancar.

Dibawah ini adalah tingkat pengembalian pinjaman di Desa Brangsong adalah sebagai berikut :

Tabel 4.23 Pembayaran angsuran di kedua Desa Blorok

NT.		0	T						
No	KSM	Pokok	Jasa	Jumlah					
Mare	Maret – Desember 2008								
1.	Rizki jaya	2.253.150	712.200	2.965.350					
2.	Kencana Mulya	5.012.162	204.333	5.216.495					
3.	Mawar	1.546.400	237.600	1.784.000					
4.	Dana Usaha	2.125.800	333.000	4.242.800					
6	Jaya Mukti	2.125.000	472.000	2.597.000					
7.	Bersama	2.141.000	508.000	2.649.000					
8.	Bakti Usaha	1.111.000	131.000	1.242.000					
9.	Jaya Abadi	2.124.000	450.000	2.574.000					
Janua	ari 2009 – Maret 2010			4 0 1					
10.	Mandiri	2.125.156	120.000	2.245.156					
11	Harapan Jaya	4.256.000	560.000	4.816.000					
12	Citra Makmur	4.231.000	180.000	4.411.000					
13	Berkah Sejahtera	4.124.000	570.000	4.694.000					
Dese	Desember 2009 – Februari 2010								
14	Jasa Sejahtera	5.231.000	880.000	6.111.000					
15	Harapan sejato	3.667.000	670.000	4.337.000					

Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa antara desa Blorok dan Brangsong terdapat perbedaan pembayaran angsuran, sehingga dalam hal ini angsuran yang ada di Desa Barangsong lebih lambat dari pada Desa Blorok.

#### 4.1.6 Keberhasilan Implementasi P2KP

Usaha penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai program, salah satunya adalah Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Berbagai program

kemiskinan terdahulu yang bersifat parsial dan sektoral dalam pelaksanaannya masih terjadi hal-hal yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan belum menyentuh akar permasalahannya.

Mengacu pada hal tersebut, P2KP dalam pelaksanaannya menggunakan strategi dalam bentuk fasilitasi untuk perubahan sikap perilaku masyarakat, dengan metode pelaksanaan berbentuk pembelajaran. Strategi dan metode yang digunakan tersebut terkesan unik, karena sangat berbeda dengan yang selama ini digunakan oleh program-program sejenis lainnya. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang digunakan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, modal usaha dan perbaikan lingkungan, dalam P2KP diposisikan sebagai alat pelengkap kegiatan pembelajaran dan menjadi stimulan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku masyarakat.

Berikut keberhasilan pelaksanakan program P2KP di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tahun 2007/2008.

PERPUSTAKAAN

Tabel 4.22 Implementasi P2KP di Desa Blorok dan Brangsong

No	No Nama program Tingkat Keberhasilan					Jumlah
		0% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 100%	
Desa	Blorok					
1	Perbaikan jalan		1	1		2
2	Perbaikan jembatan		1	1	1	3
3	Pembangunan MCK	2	5	7	1	15
4	Pembangunan tempat sampah	1	4	1	-	6
5	Penerangan jalan	2		3	-	7
6	Pembangunan rumah layak huni	1	EGE	2	1	4
	Jumlah		13	15	3	37
Desa	Brangsong	Die		0.		
1	Perbaikan jalan		5	0/	7	12
2	Perbaikan jembatan	1		5	2	7
3	Pembangunan MCK	2	2			13
4	Pembangunan tempat sampah	1	2		6	16
5	Penerangan jalan	2		3	2	12
6	Pembangunan rumah layak huni	1		5	NE	7
- 0	Jumlah		14	20	25	53

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keberhasilan P2KP mencapai 51%-75%. Pelaksanaan program P2KP tertinggi adalah pembangunan temtap sampah yang berada pada tingkat 76%-100%. Pembangunan tempat sampah juga dapat dikatakan cukup berhasil, meskipun belum semua warga memiliki kesadaran untuk memiliki tempat sampah sendiri melainkan membuang sampahnya ke sungai yang berada di dekat rumahnya. Selanjutnya perbaikan jalan dan pembangunan tempat sampah dapat mencapai 51%-75% dari target yang ditetapkan. Pembangunan jalan lebih diutamakan pada jalan desa (utama). Meskipun belum sebua jalan desa terselesaikan namun keberhasilan ini sudah cukup membantu akses masyarakat di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal khususnya dalam bidang pertanian dan perdagangan. Pembangunan tempat

sampah juga dapat dikatakan cukup berhasil, meskipun belum semua warga memiliki kesadaran untuk memiliki tempat sampah sendiri melainkan membuang sampahnya ke sungai yang berada di dekat rumahnya.

Program perbaikan jembatan dan penerangan jalan di Desa Blorok masih kurang berhasil. Dari 10 titik yang direncanakan, baru 4 titik yang sudah terselesaikan. Hal ini terhalan dengan besarnya dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sama halnya dengan penerangan jalan. Program ini cukup terbantu karena adanya kerjasama dengan PLN setempat untuk memperbaiki lampu-lampu jalan yang rusak. Namun untuk penerangan yang berada di dalam gang belum dapat terpenuhi semua, karena beberapa warga belum memasang listrik sendiri.

Pembangunan rumah layak huni dapat dikatakan sebagai program yang belum berhasil. Memang program direncanakan untuk dilakukan pada tahun depan setelah program lainnya berhasil. Kondisi masyarakat di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal sebagain besar sudah memiliki rumah layak huni sehingga prioritas utama dalam program perencanaan pembangunan P2KP lebih diutamakan pada pembangunan MCK (kesehatan) dan pembangunan perbaikan jalan.

# 4.1.7 Kondisi Keluarga di Kecamatan Brangsong

Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, dan mata pencaharian yang tidak menentu. Kondisi keluarga di Kecamatan Brangsong jika

ditinjau dari tingkat pendidikan, pekerjaan dan jumlah tanggungan dalam rumah memiliki potensi untuk berkembang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar masyarakat di Kecamatan Bransong memiliki tingkat pendidikan SMP dan jenis pekerjaan sebagian besar sebagai pedagang dengan rata-rata jumlah tanggungan keluarga sebanyak 3 orang. Pemerintah Indonesia, melalui direktorat jenderal Perumahan dan Pemukiman eks Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), telah melakukan berbagai upaya penanganan masalah kemiskinan perkotaan. Salah satu diantaranya adalah Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan sejak tahun 1999.

Pemerintah bersama masyarakat sebagai pelaku utama upaya penanggulangan kemiskinan, tentu saja dituntut kapasitas dan kapabilitas yang mendukung. Dalam hal inilah peran pemerintah, salah satunya melalui P2KP, berupaya untuk mendorong proses pengembangan atau pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat agar mampu menanggulangi persoalan kemiskinan di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat tersebut sesungguhnya sangat berkaitan erat dengan proses transformasi sosial di masyarakat miskin. Pada awalnya P2KP dilaksanakan dalam rangka menangani kemiskinan struktural maupun yang diakibatkan krisis ekonomi tahun 1997.

P2KP dilaksanakan untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan, yang tidak hanya bersifata reaktif terhadap keadaan darurat

akibat krisis ekonomi tetapi bersifat strategis, karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang kuat bagi perkembangan masyarakat dimasa mendatang. Upaya pengentasan kemiskinan dapat dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan melaui kelembagaan masyarakat, kelembagaan yang dimaksud adalah Badan Keswdayaan Masyarakat (BKM), yang kebera daannya benar — benar mewakili kepentingan masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin dan dapat mengakomodasikan seluruh aspirasi masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan kemiskinan di wilayah kelurahan sasaran P2KP.

# 4.1.8 Implementasi P2KP

Implementasi P2KP tahun 2007 merupakan implementasi yang pertama kalinya di Kecamatan Brangsong, bahkan yang pertama kali di Kabupaten Kendal. Pelaksanaan di tingkat desa dilakukan sepenuhnya oleh BKM dengan dibantu KSM. Alokasi dana P2KP ini rata-rata sebesar Rp 250.000.000. Dana ini merupakan dana dari APBD dan APBN, yang ditanggung bersama. Selain dari APBD dan APBN terdapat dana dari swadaya masyarakat. Dana tersebut akan disalurkan dalam 3 tahap. Dalam realisasi di lapangan, yang baru keluar hanya dana dari APBD sebesar Rp 125.000.000. Sehingga implementasi P2KP difokuskan pada kegiatan infrastruktur desa, yaitu perbaikan jalan desa.

Penyaluran dana P2KP dari dana APBN dibagi dalam 3 tahap, sama halnya dengan penyaluran dana dari APBD, namun dana dari APBD

langsung dibayarkan dan mencakup 3 tahap, sehingga proses penyaluran dana dapat lebih cepat terealisasikan. Penyaluran dana tersebut yang rencananya dibayarkan dalam 3 tahap (lihat tabel 22), hanya baru terealisasi 1 tahap yaitu tahap 2. Sesuai dengan surat perjanjian penyaluran bantuan BLM BKM antara PJOK dan BKM disebutkan bahwa penyaluran dana tahap 1 sebesar Rp 17.500.000 dari pos APBN belum cair, sehingga langsung disalurkan dana tahap 2 sebesar Rp 87.500.000 dari pos APBD Kabupaten Kendal. Dana tahap 2 yang sudah terealisasi dari APBD Kabupaten Kendal digunakan untuk melaksanakan program kegiatan lingkungan (fisik) yang antara lain melaksanakan perbaikan jalan desa. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam surat perjanjian bantuan BLM BKM bahwa sebagian besar dana digunakan untuk melaksanakan kegiatan lingkungan fisik.

#### 4.1.9 Tingkat Keberhasilan Implementasi P2KP

Tingkat keberhasilan implementasi P2KP dilihat dari penilaian keluarga miskin mengenai P2KP dan tingkat implementasi program. Berdasarkan hasil penelitian, sebesar 97 % keluarga miskin menilai implementasi P2KP berhasil dengan adanya manfaat langsung seperti menghemat pengeluaran untuk transportasi, menghindari kecelakaan, bermanfaat untuk kepentingan umum, dan memudahkan mengangkut hasil-hasil pertanian sedangkan manfaat tidak langsung yang dirasakan masyarakat adalah dapat menggerakan perekonomian desa. Berdasarkan tingkat implementasi program yang terimplementasi sebanyak 100 % dan

tidak terimplementasi sebanyak 0%, hal ini menunjukkan tingkat implementasi P2KP sangat tinggi.

#### 4.2 Pembahasan

## 4.2.1 Kondisi Keluarga di Kecamatan Brangsong

Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, dan mata pencaharian yang tidak menentu. Kondisi keluarga di Kecamatan Brangsong jika ditinjau dari tingkat pendidikan, pekerjaan dan jumlah tanggungan dalam rumah memiliki potensi untuk berkembang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar masyarakat di Kecamatan Bransong memiliki tingkat pendidikan SMP dan jenis pekerjaan sebagian besar sebagai pedagang dengan rata-rata jumlah tanggungan keluarga sebanyak 3 orang. Pemerintah Indonesia, melalui direktorat jenderal Perumahan dan Pemukiman eks Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), telah melakukan berbagai upaya penanganan masalah kemiskinan perkotaan. Salah diantaranya adalah Proyek satu Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan sejak tahun 1999.

Pemerintah bersama masyarakat sebagai pelaku utama upaya penanggulangan kemiskinan, tentu saja dituntut kapasitas dan kapabilitas yang mendukung. Dalam hal inilah peran pemerintah, salah satunya melalui P2KP, berupaya untuk mendorong proses pengembangan atau pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat agar mampu menanggulangi persoalan kemiskinan di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat tersebut sesungguhnya sangat berkaitan erat dengan proses transformasi sosial di masyarakat miskin. Pada awalnya P2KP dilaksanakan dalam rangka menangani kemiskinan struktural maupun yang diakibatkan krisis ekonomi tahun 1997.

P2KP dilaksanakan untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan, yang tidak hanya bersifata reaktif terhadap keadaan darurat akibat krisis ekonomi tetapi bersifat strategis, karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang kuat bagi perkembangan masyarakat dimasa mendatang. Upaya pengentasan kemiskinan dapat dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan melaui kelembagaan masyarakat, kelembagaan yang dimaksud adalah Badan Keswdayaan Masyarakat (BKM), yang keberadaannya benar – benar mewakili kepentingan masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin dan dapat mengakomodasikan seluruh aspirasi masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan kemiskinan di wilayah kelurahan sasaran P2KP.

### 4.2.2 Implementasi P2KP

Implementasi P2KP tahun 2007 merupakan implementasi yang pertama kalinya di Kecamatan Brangsong, bahkan yang pertama kali di

Kabupaten Kendal. Pelaksanaan di tingkat desa dilakukan sepenuhnya oleh BKM dengan dibantu KSM. Alokasi dana P2KP ini rata-rata sebesar Rp 250.000.000. Dana ini merupakan dana dari APBD dan APBN, yang ditanggung bersama. Selain dari APBD dan APBN terdapat dana dari swadaya masyarakat. Dana tersebut akan disalurkan dalam 3 tahap. Dalam realisasi di lapangan, yang baru keluar hanya dana dari APBD sebesar Rp 125.000.000. Sehingga implementasi P2KP difokuskan pada kegiatan infrastruktur desa, yaitu perbaikan jalan desa.

Penyaluran dana P2KP dari dana APBN dibagi dalam 3 tahap, sama halnya dengan penyaluran dana dari APBD, namun dana dari APBD langsung dibayarkan dan mencakup 3 tahap, sehingga proses penyaluran dana dapat lebih cepat terealisasikan. Penyaluran dana tersebut yang rencananya dibayarkan dalam 3 tahap (lihat tabel 22), hanya baru terealisasi 1 tahap yaitu tahap 2. Sesuai dengan surat perjanjian penyaluran bantuan BLM BKM antara PJOK dan BKM disebutkan bahwa penyaluran dana tahap 1 sebesar Rp 17.500.000 dari pos APBN belum cair, sehingga langsung disalurkan dana tahap 2 sebesar Rp 87.500.000 dari pos APBD Kabupaten Kendal. Dana tahap 2 yang sudah terealisasi dari APBD Kabupaten Kendal digunakan untuk melaksanakan program kegiatan lingkungan (fisik) yang antara lain melaksanakan perbaikan jalan desa. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam surat perjanjian bantuan BLM BKM bahwa sebagian besar dana digunakan untuk melaksanakan kegiatan lingkungan fisik.

## 4.2.3 Tingkat Keberhasilan Implementasi P2KP

Tingkat keberhasilan implementasi P2KP dilihat dari penilaian keluarga miskin mengenai P2KP dan tingkat implementasi program. Berdasarkan hasil penelitian, sebesar 97 % keluarga miskin menilai implementasi P2KP berhasil dengan adanya manfaat langsung seperti menghemat pengeluaran untuk transportasi, menghindari kecelakaan, bermanfaat untuk kepentingan umum, dan memudahkan mengangkut hasil-hasil pertanian sedangkan manfaat tidak langsung yang dirasakan masyarakat adalah dapat menggerakan perekonomian desa. Berdasarkan tingkat implementasi program yang terimplementasi sebanyak 100 % dan tidak terimplementasi sebanyak 0%, hal ini menunjukkan tingkat implementasi P2KP sangat tinggi.



#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

## 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

- (1) Kondisi keluarga miskin di Kecamatan Brangsong menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan adalah SD dengan pekerjaan tetap sebagai pedagang. Tingkat pendapatan masyarakat sebagian besar > Rp.600.000,00 setiap bulan dengan jumlah tanggungan keluarga dalam satu rumah berkisar antara 3 5 orang.
- (2) Implementasi P2KP dilihat dari penilaian masyarakat mengenai P2KP, berdasarkan hasil penelitian, rata-rata sebesar 74,34 % masyarakat menilai implementasi P2KP berhasil dengan adanya manfaat langsung (seperti menghemat pengeluaran untuk transportasi, menghindari kecelakaan, bermanfaat untuk kepentingan umum, dan memudahkan mengangkut hasilhasil pertanian.
- (3) Keberhasilan P2KP dalam melaksankan programnya mencapai 51%-75%. Pelaksanaan program P2KP tertinggi adalah pembangunan MCK yang berada pada tingkat 76%-100%. MCK merupakan salah satu fasilitas yang sangat vital bagi sebuah keluarga. Keberadaan MCK yang bersih dan sehat diharapkan akan meningkatkan kesehatan masyarakat di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

#### 5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut :

- (1) Bagi BKM, hendaknya selalu berusaha untuk memberikan pemahaman yang benar dan tepat kepada keluarga miskin, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dengan penerima bantuan, dan bagi pelaksanaan P2KP selanjutnya perlu diupayakannya pendekatan yang lebih persuasif dan menarik kepada KSM KSM yang ada, misalnya pertemuan atau sarasehan yang dikondisikan dengan tidak begitu formil namun tetap tepat pada sasaran yang dituju.
- (2) Bagi keluarga miskin, hendaknya dapat mempergunakan dana yang telah dipinjamkan sesuai dengan yang telah direncanakan, dengan menjalankan usaha produktif sehingga pendapatan dapat meningkat, dan apabila mendapatkan kesulitan segera dimusyawarahkan dengan BKM yang ada. Selain itu masyarakat hendaknya dapat lebih aktif dalam menghadiri dan mengikuti pertemuan maupun pelatihan bagi KSM yang dilakukan oleh BKM sehingga pemahaman dan kemampuan mereka untuk memanfaatkan bantuan yang diperoleh maksimal yang akhirnya bantuan tersebut mampu menjadi pendorong untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- (3) Bagi Pemerintah daerah, pelaksanaan P2KP hendaknya lebih ditingkatkan terutama masalah alokasi dana. Pemda Kabupaten Kendal seharusnya dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan proporsi dana P2KP sehingga implementasi P2KP dapat berjalan lebih optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta :* Rineka Cipta.
- Arsyad. L. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Yogyakarta. BPFE UGM.
- Azhari, Ichwan. 1992, *Analisis Kemiskinan di Pedesaan Sumatra Utara*, Dalam Harian Mimbar Umum 24 Januari 1992, Medan.
- Ismail, Zarmawis, 1999, Masalah Kemiskinan Masyarakat Perkampungan Kumuh di Perkotaan: Kasus Yogyakarta dan Surabaya, Jakarta :Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan, LIPI.
- Kuncoro, Mudrajad, 2003, Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mubyarto, 1990, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, cetakan kedua, Jakarta: LPES.
- Rangkuty, Fredy, 2006. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Gramedia. Jakarta.
- Suparlan, Parsudi, 1993, Kemiskinan di Perkotaan, Yayasan Obor Jakarta
- Turner J., 1972, "Housing issues and the Standar Probloms", In Ekistic, Vol.33, No.196. halaman 154.
- Salim, Emil 1984, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Jakarta: P.T.Pustaka LP3ES.
- Sahdan, Gregorius, 2005, *Menanggulangi Kemiskinan Desa*, dalam Jurnal Ekonomi Rakyat. http://www.jurnalekonomirakyat.com
- Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C, 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, jilid 1, Edisi Kedelapan*, diterjemahkan oleh Haris Munandar Jakarta:Penerbit Erlangga.
- Widodo, Tri, 2006, Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah), Yogyakarta : UPP STIM YKPN

# ANGKET PENELITIAN IMPLEMENTASI P2KP DI KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007

A.	IN	DENTITAS RESPONDEN	I
	1.	Nama Responden	<u>:</u>
	2.	Alamat Rumah	:
		a. Desa Blorok	
		b. Desa Bransong	
	3.	Jenis Kelamin	·····
		a. Laki-laki	NEGERI
		b. Perempuan	4 .00
	4.	Usia	:
		a. 15- 19 Thn c. 3	30- 39 Thn
		b. 20- 29 Thn d.	40- Thn Keatas
	5.	Pendidikan Terakhir	
		a. SD	·
		b. SMP	·
		c. SMA	:
		d. Perguruan Tinggi	·
	6.	Pekerjaan	·
	7.	Penghuni dalam rumah	
		a. Bapak :	Orang
		b. Ibu :	Orang
		c. Saudara :	Orang
		d. Lainnya :	Orang
	8.	Berapa luas lantai bangunan	n tempat tinggal bapak/ibu/saudara/i?
		e. < 8  m2	c. 10 m2
		f. 8 m2	d. > 10m2
	9.	Terbuat dari apa jenis lanta	i bangunan tempat tinggal bapak/ibu/saudara/i?
		a. Tanah	c. Plester
		b. Kayu	d. Keramik

10. Terbuat dari apa dinding	g tempat tinggal bapak/1bu/saudara/1?
a. Bambu	c. Plester
b. Kayu	d. Keramik
11. Bagaimana sumber pene	erangan rumah tangga bapak/ibu/saudara/i?
a. Menggunakan teplol	k c. Menyambung listrik tetangga
b. Menggunakan petro	mak d. Listrik sendiri
12. Berasal darimana sumbe	er air minum di tempat bapak/ibu/saudara/i?
a. Berasal dari air huja	n c. Berasal dari sumur
b. Berasal dari sungai	d. Berasal dari PAM
13. Bahan bakar apa yang b	apak/ibu/saudara/i gunakan untuk memasak sehari-
hari?	4 00
a. Kayu bakar	c. Kompor
b. Arang	d. Gas
14. Berapa kali bapak/ibu/sa	audara/i mengkonsumsi daging dalam satu minggu?
a. 1 kali	c. 3 kali
b. 2 kali	d. > 3 kali
15. Hanya membeli satu ste	l pakaian baru dalam setahun
a. 1 kali	c. 3 kali
b. 2 kali	d. > 3 kali
16. Kemanakah keluarga ba	npak/ibu/saudara/i berobat jika menderita sakit?
a. Dokter umum	c. Puskesmas
b. Mantri	d. Alternatif
	ak/ibu/saudara/i setiap bulan?
a. < Rp 600.000,00	c Rp 1.000.000,00
b. Rp 600.000,00	d. > Rp 1.000.000,00
18. Jenis perabot rumah tan	gga apa saja yang bapak/ibu/saudara/i miliki
sekarang?	
· ·	ari, tempat tidur dan meja kursi makan
b. Meja, kursi tamu, alm	•
c. Meja, kursi tamu dan	almari
d. Meja dan kursi tamu	

# В.

В.	IM	PLEMENTASI
	1.	Apakah tujuan didirikannya BKM?
	2.	Apakah fungsi BKM?
	3.	Berapa jumlah KSM yang ada di bawah koordinasi BKM ?
	4.	Apa saja program P2KP di desa anda ?
	5.	Berapa alokasi dana P2KP di desa anda ?
	6.	Berapa dana P2KP di desa anda yang sudah terealisasi ?
	7.	Apa program P2KP yang sudah dilaksanakan ?
	8.	Berapa alokasi waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program P2KP?
	9.	Bagaimana pelaksanaan program P2KP di desa anda ?
	10.	. Apakah pelaksanaan program P2KP di desa anda sudah sesuai dengar
		pedoman P2KP?
	11.	. Bagaimana manfaat program P2KP terhadap masyarakat miskin di desa
		anda?
	12.	. Bagaimana kelemahan dari program P2KP tersebut ?
C.	PE	NGGUNAAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR
	1.	Menurut bapak/ibu/saudara/i apakah proyek pengasapalan jalan sesua
		dengan kebutuhan masyarakat saat ini?
		a. Sangat sesuai
		b. Cukup sesuai
		c. Kurang sesuai
		d. Tidak sesuai
		Alasan:

2.	Menurut bapak/ibu/saudara/i , apakah proyek pengaspalan jalan yang
	dilaksanakan dalam program P2KP efektif dalam meningkatkan akses jalan
	sehingga berdampak pada kemajuan perdagangan?
	a. Sangat efektif
	b. Cukup efektif
	c. Kurang efektif
	d. Tidak efektif
	Alasan:
3.	Setelah adanya proyek perbaikan rumah yang dilaksanakan P2KP apakah
	kondisi perumahan masyarakat di sekitar bapak/ibu/saudara/i menjadi layak
	huni?
	a. Sangat layak
	b. Cukup layak
	c. Kurang layak
	d. Tidak layak
	Alasan:
4	
4.	Menurut bapak/ibu/saudara/i , secara keseluruhan bagaimana pelaksanaan
	program P2KP?
	<ul><li>a. Sangat efektif</li><li>b. Cukup efektif</li></ul>
	<ul><li>b. Cukup efektif</li><li>c. Kurang efektif</li></ul>
	d. Tidak efektif
	Alasan:
	Adam .

5.	Menurut bapak/ibu/saudara/i bagaimana partisipasi masyarakat dalam
	membantu program-program P2KP?
	a. Sangat aktif
	b. Cukup aktif
	c. Kurang aktif
	d. Tidak aktif
	Alasan:
6.	
	P2KP?
	a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, implementasi, pemanfaatan,
	dan dalam evaluasi program
	b. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, implementasi dan
	pemanfaatan
	c. Partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan
	d. Partisipasi dalam evaluasi program
	Alasan:
7.	Menurut bapak/ibu/saudara/i , bagaimana prosedur penyaluran bantuan
/.	P2KP?
	a. Cepat dan tidak berbelit-belit
	<ul><li>b. Cepat meskipun agak berbelit-belit</li></ul>
	c. Lambat meskipun tidak berbelit-belit
	d. Lambat dan berbelit-belit
	Alasan:
	7 Husun
8.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan anda menyelesaikan persyaratan guna

pengajuan permohonan bantuan dana pinjaman P2KP?

	a. > 6 hari b. 3 - 6 hari c. 2 - 3 hari d. < 2 hari Alasan:	
9.	Berapa dana bantuan yang bapak/ibi	u/saudara/i terima dari program P2KP?
	a. > Rp. 750.000	c. Rp. 500.000
	b. Rp. 750.000	d. Rp. 250.000
	Alasan:	EAL
10.	Dari berbagai program pengentasa	nn kemiskinan yang bapak/ibu/saudara/i
	ketahui, program manakah yang lebi	ih memberikan manfaat untuk keluarga ?
	a. P2KP	c. KUT
	b. BLT	d. Raskin
	Alasan:	
	(/	
	PERPUSTA	ES

# PEDOMAN WAWANCARA KEBERHASILAN IMPLEMENTASI P2KP DI KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007

1.	Menurut bapak/ibu/saudar	ra/i, apakah P2	2KP berhasil d	li desa bapak/i	bu/saudara/i?
	a. Berhasil, alasan:				
	b. Tidak berhasil, alasan	NEG	ER,		
2.	Implementasi Program				
N	o Nama program	Tingkat Keberhasilan			
		0% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 100%
$\vdash$					

No	Nama program	Tingkat Keberhasilan			
	13	0% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 100%
1	Perbaikan jalan	/		- u	'
2	Perbaikan jembatan				
3	Pembangunan MCK				
4	Pembangunan tempat sampah		5		
5	Penerangan jalan	ERPUS 17	IKAAN		
6	Pembangunan rumah layak huni				